

**PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA DAN *RETURN ON ASSET*
SERTA KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

OLEH:

DINI RAHMIATI SALDUSRI (14312515)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA DAN *RETURN ON ASSET*
SERTA KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2016-2018)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Dini Rahmiati Saldusri

Nomor Induk Mahasiswa: 14312515

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 29 April 2021

Penulis,



(Dini Rahmiati Saldusri)

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA DAN *RETURN ON ASSET*
*SERTA KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK***

**(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2016-2018)**

Diajukan Oleh:

Dini Rahmiati Saldusri (14312515)

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 29 April 2021

Dosen Pembimbing,



Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA DAN RETURN ON ASSET SERTA KONEKSI
POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018)**

Disusun Oleh : **DINI RAHMIATI SALDUSRI**
Nomor Mahasiswa : **14312515**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Rabu, 16 Juni 2021**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Johan Arifin,,S.E., M.Si., Ph.D.



Penguji : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc.,SAS.,ASPM.,Ph.D.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



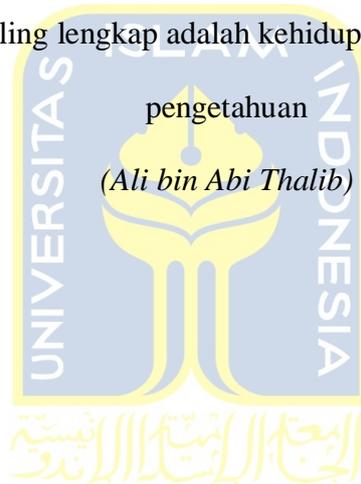
Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya. Jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.

(Lenang Manggala)

Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan *Return On Asset* serta Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak” Skripsi ini disusun sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Selama penyusunan skripsi ini saya telah mendapatkan doa, bantuan, bimbingan, dukungan, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi doa, bantuan, bimbingan, dukungan, dan nasihat demi terselesainya skripsi ini.

1. Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada mama saya, Ibu Deni Warti, terima kasih Doa, dukungan dan nasihat yang tidak pernah berhenti selama ini.
3. Kakak saya, Uda Fajrian Saldusri yang selalu mendukung dan menyemangati saya selama ini.

4. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFrA selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak atas bimbingan bapak, bapak selalu meluangkan waktu walau sesibuk apapun. Terima kasih atas ilmu, nasihat, saran, dan pengarahan bapak selama proses bimbingan. Semoga ilmu yang telah bapak berikan selalu bermanfaat dan menjadi amalan bapak.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi FBE UII atas ilmu yang sangat berharga
8. Teman-teman di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII angkatan 2014 yang telah memberikan berbagai kenangan dan pelajaran hidup selama masa perkuliahan.
9. Enno Maylia Jihan dan Muslimatul Wathni D.N yang merupakan teman seperjuangan dan mendukung satu sama lain.
10. Annisa Aulia Rahmasari dan Rizal Giri Laksono yang walaupun sudah menyelesaikan lebih dahulu tetap memberi *support* serta saran dan perhatian kepada penulis.
11. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 29 April 2021

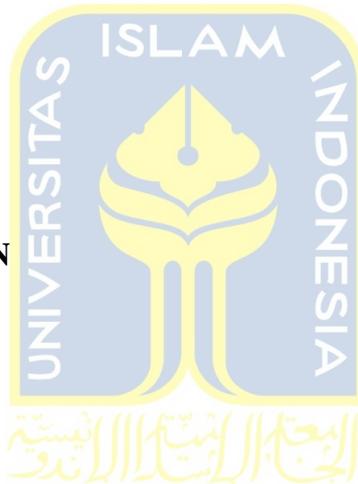
Penulis,

Dini Rahmiati Saldusri



DAFTAR ISI

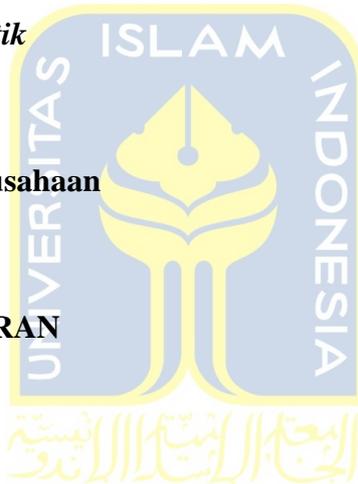
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman lembar Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I	16
PENDAHULUAN	16
I.1 Latar Belakang	16
I.2 Rumusan Masalah	20
I.3 Tujuan Penelitian	20
I.4 Manfaat Penelitian	20
I.5 Sistematika Penulisan	21
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23



2.1	Landasan Teori	23
2.1.1.	Teori Agensi	23
2.1.2.	Pajak	25
2.1.3.	Perencanaan Pajak	26
2.1.4.	Penghindaran Pajak	28
2.2	Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis	29
2.2.1.	Pengaruh Kepemilikan Keluarga (<i>Family Ownership</i>) terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	31
2.2.2.	Pengaruh <i>Return On Asset (ROA)</i> terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	32
2.2.3.	Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	33
2.3	Penelitian Terdahulu	34
BAB III		43
METODE PENELITIAN		43
3.1	Penentuan Populasi dan Sampel	43
3.1.1.	Populasi	43
3.1.2.	Sampel	43
3.2	Jenis dan Sumber Data	44
3.3	Metode Pengumpulan Data	44
3.4	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	45
3.4.1.	Variabel Dependen	45
3.4.2.	Variabel Independen	46

3.4.2.1. Kepemilikan Keluarga	46
3.4.2.2. Return On Assets (ROA)	47
3.4.2.3. Koneksi Politik	47
3.4.3. Variabel Kontrol	48
3.4.3.1. <i>Leverage</i>	48
3.4.3.2. Ukuran perusahaan (<i>Size</i>)	49
3.5 Metode Analisis	50
3.5.1. Statistik Deskriptif	50
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	50
3.5.2.1. Multikolinearitas	51
3.5.2.2. Heteroskedastisitas	52
3.5.3. Uji Analisis Regresi Berganda	52
3.5.4. Uji Kelayakan Model	54
3.5.4.1. Analisis Koefisien Determinan	54
3.6 Pengujian Hipotesis	54
3.6.1. Uji Parsial (Uji t)	54
BAB IV	56
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Objek Penelitian	56
4.2 Uji Statistik Deskriptif	56
4.3 Uji Asumsi Klasik	58
4.3.1. Uji Normalitas	58
4.3.2. Uji Multikolinearitas	59

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas	60
4.4 Uji Analisis Regresi Berganda	60
4.5 Analisis Koefisien Determinan	62
4.6 Uji Hipotesis	63
4.6.1. Uji Parsial (Uji t)	63
4.7 Pembahasan	66
4.7.1. Kepemilikan Keluarga	66
4.7.2. Return On Assets (ROA)	68
4.7.3. Koneksi Politik	70
4.7.4. Leverage	72
4.7.5. Ukuran Perusahaan	73
BAB V	74
SIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran	75
Daftar Pustaka	76



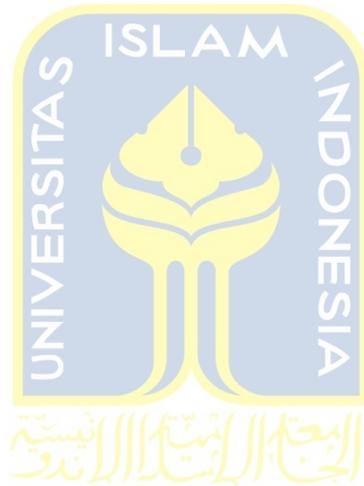
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	26
Tabel 4.1 Data Jumlah Sampel	42
Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif	43
Tabel 4.3 Uji Normalitas	43
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas	44
Tabel 4.6 Uji Analisis Regersi Berganda	45
Tabel 4.7 Uji Analisis Koefesien Determinan	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial	48



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	64
LAMPIRAN II	66
LAMPIRAN III	72
LAMPIRAN IV	78



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan keluarga dan *return on assets* serta koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Sampel penelitian ini berjumlah 225 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini dianalisis menggunakan metode regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Kepemilikan Keluarga, *Return On Assets*, Koneksi Politik, *Leverage*, Ukuran Perusahaan.

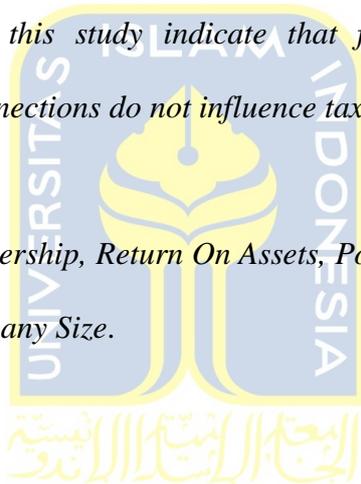
ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of family ownership and return on assets as political connections to tax avoidance.

The population used in this study were manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2016 to 2018. The sample of this study was 225 companies using the purposive sampling method. In testing the hypothesis, this study analyzed using multiple regression methods.

The results of this study indicate that family ownership affects tax avoidance. political connections do not influence tax avoidance

Keywords: *Family Ownership, Return On Assets, Political Connections, Leverage, Company Size.*



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan Negara dan daerah bersumber dari pajak. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Dharma, 2014)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan perpajakan merupakan sumbangan wajib orang perseorangan atau badan hukum kepada negara. Menurut undang-undang, perpajakan ini bersifat wajib tanpa kompensasi langsung. Digunakan untuk kepentingan Negara demi kemakmuran negara yang lebih besar. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Brotodiharjo, 2013).

Perusahaan atau para pengusaha mungkin memiliki preferensi yang berbeda mengenai penghindaran pajak. Intensif untuk menghindari pajak didorong oleh berbagai faktor seperti *size*, *leverage*, koneksi politik dan *corporate governance*. Oleh karena itu, intensif dalam kegiatan berisiko

tersebut dapat bervariasi melalui berbagai kelompok pemegang saham. Sejumlah studi terbaru mengangkat *family ownership* sebagai pengaturan yang unik dalam organisasi ekonomi.

Diberbagai Negara perusahaan yang umum ditemukan adalah perusahaan dengan dengan kepemilikan keluarga. Sebanyak 68% dari jumlah keseluruhan perusahaan di dunia yang *go public* berstatus adalah *family ownership company*. Rata-rata di Indonesia kepemilikan oleh keluarga sebesar 45%, di mana ini memberikan wewenang bagi keluarga untuk mengatur kinerja perusahaan (Wiranata, 2013).

Konsentrasi kepemilikan yang dimiliki oleh 15 keluarga tertinggi atas kepemilikan perusahaan Indonesia mencapai 62%, sedangkan *rating* atas *Corporate Governance* yang cukup rendah yaitu 2 dari skala 10 (Cleassens, 2012).

Gaaya, dkk(2017) menyatakan pendapatnya bahwa perusahaan keluarga memiliki biaya keagenan yang lebih rendah karena kepemilikan yang serta investasi jangka panjang. Kondisi ini banyak memengaruhi perusahaan di negara-negara berkembang karena dapat di atas secara efisien serta meminimalisir konflik antara pemegang saham dan manajer yang dituangkan dalam *agency theory*.

Perusahaan dengan *family ownership* memiliki pajak kurang agresif dibandingkan dengan *non-family ownership* (Gaaya, dkk, 2017). Oleh karena itu, *family* kurang memiliki insentif untuk menghasilkan arus kas tambahan untuk membentuk potensi denda dan biaya reputasi kepada otoritas pajak

mendeteksi posisi pajak yang agresif. *Family ownership* lebih peduli tentang reputasi dan “*family name*” mereka karena mereka menganggap perusahaan sebagai warisan untuk diteruskan pada generasi berikutnya.

Pada saat terjadi konflik kepentingan *family firms* cenderung untuk bertindak sebagai pemegang saham pengendalian dan mengambil alih benefit kontrol dengan mengorbankan pemegang saham minoritas (Gaaya, dkk, 2017). *Family* pemegang kepemilikan pemegang investasi jangka panjang serta mengkhawatirkan reputasi menunjukkan penghindaran pajak dalam *family firms* tetap merupakan isu empiris (Chen, 2010)

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Gaaya, dkk (2017). Perbedaan peneliti ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian tahun penelitian serta variabel penelitian. Perusahaan yang dipilih pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kepemilikan keluarga. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan yang berada di Tunisia yang terdata pada tahun 2008 hingga 2013. Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur karena dinilai merupakan sampel yang tepat di mana manufaktur adalah sektor terbesar di BEI serta termotivasi dari kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ternama salah satunya ialah IKEA perusahaan manufaktur yang terjerat kasus penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$ 1 milyar dan penghindaran pajak terbesar yang terjadi pada tahun 201-2019. Pada laporan tersebut dinyatakan bahwa IKEA secara sadar terlibat dalam pergeseran laba dari negara-negara berpajak tinggi

ke anak perusahaan yang namanya tidak disebutkan dan berada di negara-negara berpajak rendah. Biaya royalti perusahaan dibebankan oleh IKEA pada berbagai perusahaan yang berada dalam lingkup kepemilikan yang sama.

Perusahaan manufaktur memiliki aset tetap dalam jumlah besar di mana nantinya kebijakan akuntansi terkait penyusutan aset tetap akan menunjukkan efek kebijakan perpajakan Wajib Pajak Badan juga secara signifikan (Hartadinata, 2013). Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *tax avoidance* sebagai variabel dependen serta *family ownership*, *return on asset (ROA)* dan koneksi politik sebagai variabel independen, serta hanya mengambil 2 dari satu set variabel kontrol yang digunakan yakni ukuran perusahaan (*size*) dan *leverage*. *Probability sampling* adalah teknik yang dipilih dalam penentuan sampel pada penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada perusahaan pada dibidang manufaktur yang tercatat di BEI dengan mengambil judul **“PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA DAN RETURN ON ASSET SERTA KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh *Return OnAsset* terhadap Penghindaran Pajak?
3. Bagaimanakah pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu memberikan bukti dan menganalisis mengenai pengaruh kepemilikan keluarga *return on asset* dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah penghindaran pajak dalam lingkup kepemilikan keluarga, *return on asset* dan koneksi politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan penghindaran pajak

yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak memengaruhi pendapatan Negara dari sektor pajak.

b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi para wajib pajak dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak terutama dalam lingkup perusahaan yang memiliki kebijakan kepemilikan keluarga, *return on assets* serta memiliki koneksi politik.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta rancangan penulisan. Pada bab ini juga memberikan definisi tentang topik penelitian yaitu Kepemilikan Keluarga, Return On Asset (ROA), Size dan Leverage yang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi kondisi teori-teori relevan yang berhubungan dengan penelitian-penelitian terdahulu mengenai tax avoidance kepemilikan keluarga, ROA, koneksi politik, leverage dan size yang dapat dijadikan sebagai standar serta referensi diskusi masalah penelitian ini. Bab ini juga berisikan hipotesis yang diusulkan serta kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian

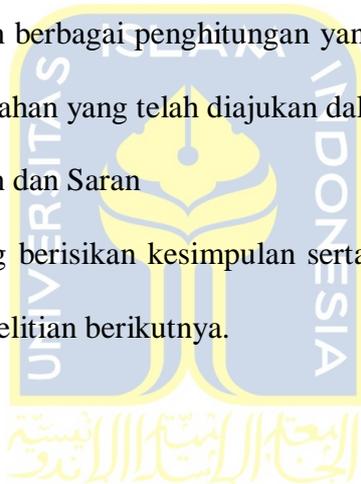
Bab ini memberikan deskripsi mengenai tata cara penelitian, melingkupi pendekatan kuantitatif untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, memaparkan pengertian variabel penelitian dengan variabel independen yaitu kepemilikan keluarga, ROA dan koneksi politik, variabel kontrol yaitu leverage dan size serta variabel dependen yaitu penghindaran pajak

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Berisikan berbagai penghitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian ini.

BAB V Simpulan dan Saran

Bab yang berisikan kesimpulan serta saran-saran yang dibutuhkan pada penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menggambarkan relasi antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Gagasan ini melahirkan hubungan kesepakatan di antara *principal* dan *agent*. Teori keagenan (*agency theory*) mencerminkan hubungan *agent* (manajemen) dengan *principal* (pemilik) yang muncul akibat masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau menjaga tingkat keberhasilan yang diinginkan (Widyawati, 2013).

Tujuan teori agensi ada dua yaitu: pertama, yaitu memperkuat kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam memproyeksikan kawasan di mana ketetapan yang diambil (*The belief revision role*). Kedua, sebagai evaluasi akhir ketetapan yang diambil agar dapat memudahkan pendistribusian hasil antara prinsipal dan agen sependapat dengan kesepakatan (*The performance evaluation role*). *Agent* diberikan wewenang oleh *principal* untuk mengurus perusahaan agar melahirkan kinerja dan *return* yang baik bagi pemilik saham.

Agent yang bertanggung jawab atas perusahaan harus mengkomunikasikan hasil perusahaan kepada *principal* tidak hanya

untuk membuktikan hasil perusahaan, tetapi juga untuk membuktikan status perusahaan. Sebagai pihak yang berhak mengelola dan mengambil keputusan di perusahaan, manajemen atau agen seringkali berselisih paham dengan direksi tanpa melaporkan informasi faktual. Tujuan melakukan hal ini tidak lain tidak bukan adalah untuk meraih keuntungan. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan di antara mereka, dapat diasumsikan bahwa agen dan klien tertarik untuk mencapai tujuan masing-masing. Benturan kepentingan yang ditimbulkan mempersulit kedua belah pihak untuk melakukan hal tersebut, terutama kerugian bagi principal karena principal biasanya tidak terlalu banyak berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan, sehingga informasi mengenai keadaan internal perusahaan dan informasi masa depan masih dirahasiakan. Aktivitas perusahaan tidak lengkap. Badan publik semacam ini disebut asimetri informasi.

Kesalahan informasi yang diberikan agen kepada *principal* akhirnya menimbulkan sejumlah masalah termasuk keputusan yang mempromosikan kebijakan perpajakan perusahaan. Sistem perpajakan Indonesia mengadopsi *self assessment system* memberikan hak perusahaan untuk menilai dan melaporkan pajak mereka. Sistem ini dianggap menguntungkan bagi agen bukan hanya karena memiliki informasi yang asimetris, tetapi juga dapat memanipulasi beban pajak perusahaan dengan cara mengurangi basis pajak perusahaan.

Beberapa ketentuan untuk memantau aktivitas agen yang terkait dengan kegiatan pengelolaan pajak. Salah satunya adalah memungkinkan semua pihak untuk mengamati dan menganalisis tindakan yang diambil oleh pihak-pihak di atas, seperti menarik hasil akun tahunan perusahaan. Perbandingan penggunaan indikator keuangan dan kepositifan fiskal. Rasio yang digunakan adalah intensitas modal dan ETR perusahaan.

Kaitan antara teori keagenan dengan penggelapan pajak adalah apabila pengelolaannya kurang baik maka pengelolaan perusahaan akan berdampak negatif bagi perusahaan. Menurut Wirdaningsih (2018) konflik bermula dari kenyataan bahwa individu adalah entitas ekonomi dan pada hakikatnya mereka mengedepankan kepentingannya sendiri. Wajib pajak dan wajib pajak mempunyai tujuan yang berbeda, dan setiap orang ingin mencapai tujuannya hasilnya terjadi konflik kepentingan. Wajib pajak ingin meminimalkan pajak untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan pengembalian investasi yang lebih cepat sementara wajib pajak ingin tertarik pada bagaimana menggunakan pendapatan pemerintah sebanyak mungkin untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara.

2.1.2. Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara. Menurut peraturan pajak adalah bea kepada Negara (dipaksakan) kepada wajib pajak dengan tidak memperoleh pengembalian, yang digunakan oleh instansi negara yang menyelenggarakan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan publik (Brotodiharjo, 2013).

Dalam skema memperkuat Pendapatan pajak pemerintah memberikan insentif pajak bagi pengusaha dalam negeri untuk menjalankan bisnis. Kredit pajak ini termasuk dalam Pasal 17 ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mengatur bahwa wajib pajak perusahaan tercatat paling sedikit 40% jumlah saham beredar yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Apabila pasar saham memenuhi beberapa persyaratan lain, maka tingkat bunga yang Anda terima akan lebih rendah 5% (lima persen) dari tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (2a) diatur menurut peraturan pemerintah.

2.1.3. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak atau biasa disebut dengan *tax planning* merupakan cara bagi wajib pajak untuk mengurangi beban perpajakannya melalui sistem yang jelas tunduk pada peraturan dan prosedur yang serasi atau tidak melanggar aturan yang ada seperti peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen

pajak dan telah mengambil langkah pertama untuk menerapkan manajemen pajak. Perencanaan perpajakan ini dilakukan secara legal, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak didasarkan pada pengumpulan dan studi aturan perpajakan untuk memilih berbagai penghematan pajak yang dapat dicapai. Ini adalah langkah pertama dalam perencanaan pajak.

Aditama (2014) memaparkan bahwa ada sejumlah cara yang dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajak, di antaranya yaitu:

- a. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah eksodus atau memindahkan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan tidak menderita beban pajaknya.
- b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan nilai pajak yang akan dibayarkan nanti oleh pihak pembeli.
- c. Transformasi adalah hukum penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan dengan sengaja oleh wajib pajak dengan memberontak peraturan atau asas perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan hukum memanipulasi beban pajak dengan tidak melaporkan

penghasilan yang sebenarnya atau secara ilegal sehingga dapat merendahkan perhitungan pajak yang terutang.

Di antara skema-skema yang digunakan tersebut ada beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau bisa memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan merupakan salah satu rancangan yang dapat dikatakan legal atau sesuai dengan aturan, akan tetapi jika itu melanggar hukum maka dikategorikan sebagai skema yang ilegal.

2.1.4. Penghindaran Pajak

Rancangan perjanjian yang bertujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan perpajakan suatu negara sehingga suatu peraturan dinyatakan legal karena tidak melanggar perundang-undangan perpajakan adalah definisi dari penghindaran pajak (Jacob, 2014). Tindakan mengurangi atau mengurangi kewajiban perpajakan melalui pengelolaan yang cermat untuk memanfaatkan celah dalam prinsip hukum perpajakan adalah gambaran dari penghindaran pajak. Penghindaran pajak juga disebut *Tax avoidance*. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah legal karena kegiatan tidak melanggar aturan sedangkan penggelapan pajak digolongkan ilegal karena melanggar aturan atau kebijakan yang berlaku.

Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Tentu saja masalah ini dapat menyebabkan para wajib pajak enggan menerapkan peraturan perpajakan dan dapat mengarah pada perlawanan. Perlawanan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pasif dan aktif (Surbakti, 2012). Perlawanan pasif situasi mempersulit pengumpulan pajak dan terkait erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif mencakup semua kontribusi dan tindakan yang secara langsung menargetkan pemerintah (otoritas pajak) untuk menghindari pajak. Masalah penggelapan pajak memainkan peran yang sangat pelik karena diselesaikan dengan dalih tidak melanggar hukum tetapi di sisi lain justru mengurangi penerimaan negara.

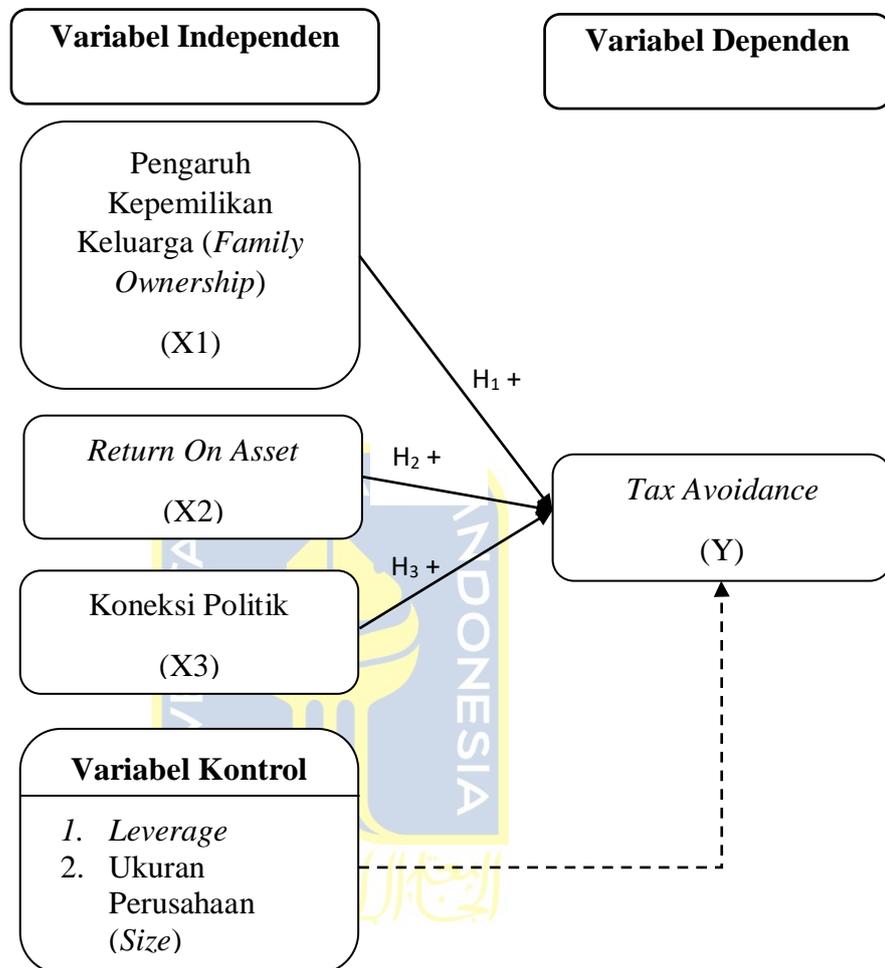
Indonesia menerapkan sistem pajak penilaian sendiri (*self assessment system*). *Self assessment system* adalah sistem perpajakan di mana wajib pajak memiliki hak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

Untuk memahami hubungan antara kepemilikan keluarga, ROA dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*, digambarkan secara skematis di bawah ini.:

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



Gambar di atas merupakan gambaran variabel penelitian dengan menggunakan tiga variabel bebas yaitu pengaruh kepemilikan keluarga (*family ownership*), *return on asset* (ROA) dan Koneksi Politik, yang mengarah pada *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen yang diwakili oleh garis lurus menandakan adanya pengaruh dan membentuk hipotesis dalam penelitian ini. Kemudian ada dua variabel kontrol yang diwakili garis putus-putus yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan (*size*).

2.2.1. Pengaruh Kepemilikan Keluarga (*Family Ownership*) terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Perusahaan keluarga biasanya memiliki pandangan jangka panjang tentang bisnis mereka. Jika perusahaan dihargai tinggi maka anggota direksi dan manajemen organisasi perusahaan akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan keinginan untuk bertindak dengan cara terbaik bagi perusahaan. *The International Finance Corporation* (IFC, 2016) menyatakan bahwa di Indonesia perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga melebihi 95%. Pendapat ini sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh *Indonesian Institute for Corporate and Directorship* (IICD, 2010) juga menyatakan bahwa lebih dari 95% bisnis di Indonesia merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga.

Wardaningsih (2018) menyatakan bahwa Perusahaan Keluarga memiliki ciri yaitu kepemilikan dan keterlibatan yang jelas dalam manajemen. Anggota keluarga menetapkan kepemimpinan (*leadership*) dan pengawasan (*control*) dipegang oleh keluarga. Keluarga akan membuat keputusan, pedoman, strategi dan tindakan untuk kegiatan bisnis sehari-hari, dengan fokus pada pengendalian dan pengaruh positif.

Kepemilikan keluarga yang kuat akan mengambil keputusan agar memperoleh manfaat dengan cara mengorbankan pemegang saham

eksternal. Mereka cenderung dan bahkan menekankan untuk melakukan *tax-saving* dan menaikkan harga sewa (Steijvers, 2014).

Penulis berkeyakinan bahwa hal ini dapat berdampak positif terhadap penghindaran pajak, sehingga penulis dapat membuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan keluarga (family ownership) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)

2.2.2. Pengaruh *Return On Asset (ROA)* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga dapat memanfaatkannya sebagai pengurangan Penghasilan kena pajak dan manfaat keringanan pajak serta keringanan pajak lainnya membuat perusahaan terlihat seperti penghindar pajak (Darmawan, 2014). Menurut Utami (2013) semakin besar CETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak.

Menurut Darmadi (2013) Perusahaan berpenghasilan tinggi dan berkinerja tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah karena perusahaan berpenghasilan tinggi dapat memperoleh keuntungan dari tarif pajak yang lebih tinggi dan pengurangan pajak lainnya.

Kesimpulannya adalah semakin tinggi ROA yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin besar pula kemampuannya dalam

melakukan pengelolaan pajak dengan cara yang dapat mengurangi beban pajak. Hipotesis dari uraian ini diungkapkan sebagai berikut:

H2: Return on asset memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)

2.2.3. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hubungan politik adalah keadaan menjalin hubungan antara partai politik tertentu dengan pihak yang berkepentingan dalam politik untuk mewujudkan kepentingan kedua belah pihak. (Purwanti, 2017).

Koneksi politik yang dilakukan oleh perusahaan membawa berbagai keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan yang dapat diperoleh koneksi politik adalah bahwa mereka lebih mungkin memperoleh kredibilitas. Rendahnya pemeriksaan pajak dipandang sebagai salah satu keuntungan perusahaan yang menjaga koneksi politik, tidak adanya kekhawatiran perusahaan dengan perencanaan pajak, dan laporan keuangan perusahaan tidak transparan. Manfaat lain yang bisa diraih terlepas dari diberikan hak eksklusif atau tidak. Pemerintah akan memberikan bantuan jika terjadi ketegangan ekonomi (Butje, 2014).

Butje (2014) juga menemukan pengaruh positif antara koneksi politik dan penghindaran pajak perusahaan yang digambarkan dengan rendahnya nilai *cash effective tax rate*.

H3 : Koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti penghindaran pajak dilakukan oleh Wirdaningsih (2018) Gaaya, dkk(2017), Fadila (2017), Putri (2017), Wijayanti (2016),Alviyani (2016), Ngadiman dan Puspitasari (2014), Butje (2014), dwipoyono (2012) dan lainnya.Dan hampir keseluruhan penelitian ini menemukan hasil yang signifikan terhadap penghindaran pajak, terlepas dari berubahnya variabel serta populasi dan sampel yang digunakan.

Penelitian dari Wirdaningsih (2018) merupakan pengembangan dari penelitian Gaaya, dkk(2017), di mana pada penelitian ini mengangkat fungsi Komisaris independen dapat secara efektif mengurangi penghindaran pajak dalam bisnis keluarga. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 hingga 2016 untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Hasil yang mereka peroleh yaitu berpengaruh signifikan di mana penelitian mereka menggunakan Efektivitas Komisaris sebagai moderasi dan ROA, DER, *Size*, *Sales Growth* Sebagai variabel kontrol.

Penelitian dari Gaaya, dkk (2017)

bertujuan untuk menjelaskan penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga pada perusahaan dengan audit sebagai efek moderasi. Di

mana desain, metodologi dan pendekatan yang mereka gunakan yaitu berdasarkan sampel 55 perusahaan yang terdaftar di Tunisia dari 2008 hingga 2013 dengan menggunakan GLS model regresi dengan estimasi kesalahan eror yang kuat yang terpusat pada tingkat perusahaan. Hasil yang mereka peroleh hasil positif berkaitan dengan praktek kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak perusahaan, di mana keluarga mengambil hak minoritas dengan mengekstraksi sewa dari posisi penghematan pajak. Namun, memperoleh hasil negatif berkaitan dengan praktek kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak berdasarkan kedudukan audit.

Fadila (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Metode penelitian yaitu dengan cara melakukan pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 hingga 2016. Hasil yang diperoleh pada tiap hipotesis dengan melihat nilai t-hitung menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh *return on asset*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional. Sedangkan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak di mana besar atau kecilnya *leverage* tidak memengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak perusahaan. Hipotesis koneksi politik juga menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Putri (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, *profitabilitas*, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu dengan cara pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *multiple linear analysis* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 sampai 2015 sebanyak 34 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena besarnya hutang perusahaan manufaktur di sub-industri konsumsi, *leverage* dan *profitabilitas* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dan ekuitas pemilik telah memperoleh hasil yang positif dan signifikan, karena semakin besar perusahaan maka semakin tinggi pula tarif pajak efektif kas perusahaan yang berarti semakin rendah tingkat penghindaran pajak.

Wijayani (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas*, kepemilikan keluarga, *corporate governance* dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Metode penelitian yaitu dengan cara mengumpulkan data dokumentasi dari ICMD dan IDX dengan cara mengambil sampel dengan metode *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014 dengan memperoleh data sebanyak 54 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* memengaruhi penghindaran pajak, kepemilikan keluarga tidak memengaruhi penghindaran pajak, *corporate governance* memiliki pengaruh

negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Alviyani (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan, eksekutif, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* pada Dinas Pertanian dan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 sebagai populasi dan memperoleh 12 perusahaan. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional, independen komisaris serta karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan untuk komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ngadiman (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012 sebanyak 170 perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan sampel menggunakan metode tidak acak. Teknik pemilihan sampel yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Stella Butje dan Elisa Tjondro (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 74 perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan hasil yang diperoleh yakni karakter eksekutif dan koneksi politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dwipoyono (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *family ownership* dalam sebuah badan usaha terhadap kinerja dari badan usaha dengan cara menggunakan dua cara pandang, yaitu dari sisi profitabilitas dan dari sisi pasar. Teknik *profitability sampling-restricted or complex probability sampling* adalah metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan meneliti berbagai sektor industri kecuali sektor perbankan keuangan yang terdaftar di BEI periode 2008-2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh positif terhadap kepemilikan keluarga dengan pengukuran profitabilitas akan tetapi tidak terlalu berpengaruh dan memperoleh hasil negatif terhadap kinerja perusahaan yang diteliti dari sisi pasar. Walaupun pengaruh negatif juga tidak terlalu signifikan.

Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada ringkasan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wirdaningsih dkk (2018)	Variabel Independen: Kepemilikan Keluarga Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Moderasi: Komisaris Independen	Hasil penelitiannya adalah Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi serta Cash ETR maupun Temp.BTD dengan ROA, DER, SIZE, Sales Growth sebagai control pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
2.	Gaaya, dkk (2017)	Variabel independen: Kepemilikan Keluarga Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Hasil penelitiannya adalah <i>family ownership</i> berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak
3.	Fadila (2017)	Variabel independen: ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi fiskal, kepemilikan institusional dan koneksi politik.	Hasil penelitiannya adalah ROA, ukuran perusahaan, kompensasi fiskal, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran

		Variabel dependen: Penghindaran pajak	pajak. Sedangkan untuk <i>leverage</i> dan koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
4.	Putri (2017)	Variabel independen: <i>Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional</i> Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitiannya adalah <i>Leverage</i> dan <i>Profitability</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
5.	Wijayani (2016)	Variabel Independen: Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, <i>Corporate Governance</i> dan Struktur Kepemilikan Variabel dependen: Penghindaran Pajak	Hasil penelitiannya adalah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>corporate governance</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan struktur kepemilikan berpengaruh

			secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
6.	Alviyani (2016)	<p>Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i>, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i>.</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	<p>Hasil penelitiannya adalah kepemilikan institusional, independen komisaris serta karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan untuk komite audit dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
7.	Ngadiman 2014)	<p>Variabel Independen: <i>Leverage</i>, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan.</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil penelitiannya adalah <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
8.	Tjondro (2014)	<p>Variabel Independen: Karakter Eksekutif dan Pengaruh Politik</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil Penelitiannya adalah karakter eksekutif dan koneksi politik memiliki pengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p>

9.	Dwipoyono (2012)	Variabel Independen: Kinerja Perusahaan Variabel Dependen: Kepemilikan Keluarga	Hasil penelitiannya adalah <i>Family Ownership</i> berpengaruh positif Terhadap <i>Firm Performance</i> Pada Badan Usaha
----	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Penentuan Populasi dan Sampel

3.1.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur dengan manajemen keluarga yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

3.1.2. Sampel

Metode pengembangan sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling* di mana pengumpulan faktor-faktor yang dimasukkan ke dalam sampel dilakukan dengan sengaja untuk memenuhi standar yang digunakan dengan catatan bahwa sampel cukup mewakili populasi (Supranto, 2003).

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dengan manajemen keluarga yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Dari jumlah keseluruhan data, ditemukan 75 perusahaan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Periode penelitian adalah 2016-2018 sehingga laporan tahunan yang diteliti berjumlah 225 laporan tahunan. Penarikan sampel yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018.
2. Perusahaan tidak bergerak di sektor keuangan ataupun perbankan seperti bank, asuransi, leasing dan securitas.
3. Selama periode pengamatan, perusahaan tersebut tidak melakukan akuisisi maupun merger.
4. Perusahaan tersebut telah memberikan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia sampai dengan bulan Agustus 2018.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Strategi pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen penelitian. Analisis data kuantitatif / statistik untuk mempelajari hipotesis yang diberikan (Sugiyono, 2016). Identifikasi masalah melalui hipotesis, yaitu memberikan tanggapan sementara terhadap masalah penelitian.

Data mengenai laporan tahunan perusahaan diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yang telah diterbitkan (<http://www.idx.co.id>). Variabel kontrol yang bersumber *Factbook* BEI (www.idx.co.id)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Metode pengumpulan data didasarkan pada berbagai studi literatur, berbagai publikasi, jurnal dan studi sebelumnya. Data

variabel dependen dan independen dapat diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs www.idx.co.id.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1. Variabel Dependen

Sugiyono (2016) mendefinisikan variabel terikat atau variabel dependen yaitu sebagai berikut: “Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.”

Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah struktur transaksi yang dirancang untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan perpajakan suatu negara. Celah tersebut memungkinkan para profesional pajak untuk mengungkapkan informasi hukum yang tidak melanggar undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:13). *Cash Effective Tax Rate (CETR)* adalah model estimasi pengukuran *tax avoidance* digunakan pada penelitian ini. Model ini dipilih model ini mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi CETR maka penghindaran pajaknya akan

semakin rendah (Warsini, 2014). Di mana semakin kecil *CETR* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

$$\text{CashCETR} = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan}}{\text{Labasebelum pajak}}$$

3.4.2. Variabel Independen

3.4.2.1. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga adalah bisnis keluarga. Jika pengelola atau keluarga memiliki lebih dari 20% hak suara perusahaan, perusahaan tersebut digolongkan pada kepemilikan keluarga (Gaaya, dkk2017). Menurut Harjono (2013) Untuk menentukan kepemilikan keluarga, pertama sesuaikan dengan informasi dalam laporan tahunan dan informasi struktur perusahaan, telusuri profil perusahaan, struktur kepemilikan dan informasi struktur perusahaan di IDX (*Indonesia Stock Exchanges*) Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2018. Lakukan proses verifikasi pemilik untuk menentukan bisnis mana yang dimiliki atau tidak dimiliki keluarga.

Oktavia (2018) mengemukakan bahwa salah satu cara mengetahui bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga yaitu nama direksi dan direksi perusahaan. Karena kepemilikan keluarga biasanya menyertakan keluarga pada direksi, serta memiliki struktur jabatan pada anak perusahaan. Jika komisaris biasanya tetap sama selama beberapa tahun dan memegang saham di perusahaan, perusahaan tersebut dapat menjadi milik keluarga (*family ownership*).

Dalam analisis kepemilikan keluarga hal yang akan diteliti yakni analisis sensitivitas yang akan diukur dengan menerapkan variabel dummy di mana 1 akan diberikan pada perusahaan yang menjadi milik keluarga dan 0 pada perusahaan bukan keluarga dan penerapannya sesuai dengan peraturan hak suara. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas apakah kepemilikan keluarga ada atau tidaknya berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3.4.2.2. Return On Assets (ROA)

ROA adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak untuk menilai seberapa strategi tingkat pengembalian pada aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut (Kasmir, 2014) *Return On Assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

3.4.2.3. Koneksi Politik

Koneksi politik dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Mulyani, Darminto dan N.P, 2014).

Untuk menentukan kepemilikan pemerintah digunakan variabel dummy dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah pemerintah (BUMN) dan 0 jika tidak (Mulyani, Darminto dan N.P, 2014).

3.4.3. Variabel Kontrol

3.4.3.1. *Leverage*

Leverage menggambarkan konsekuensi keuangan perusahaan, dan juga dapat menggambarkan bentuk permodalan dan efek kredit macet perusahaan. Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi menghadapi tanggungan yang lebih besar daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. Semakin tinggi rasio *leverage* semakin besar kemungkinan perusahaan melanggar kesepakatan utangnya. Pemangku kepentingan akan berusaha konservatif dalam keputusan investasi mereka. Dalam penelitian ini rasio *leverage* diukur dari rasio hutang terhadap ekuitas di mana *Debt to Equity Ratio* (DER) menjadi perbandingan total hutang perusahaan dengan ekuitas (Dwipoyono, 2012). Dalam struktur permodalan semakin tinggi nilai DER maka semakin banyak dana yang dipinjam dari pada dana ekuitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa solvabilitas perusahaan jauh lebih rendah, sehingga kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang sangat rendah yang berarti risiko perusahaan relatif tinggi. Risiko tinggi membuat investasi menarik bagi saham menjadi kurang menarik

(Dwipoyono, 2012). Dalam pengukuran DER (*Debt to Equity Ratio*) rumus yang sering digunakan yaitu:

$$DebtEquityRatio = \frac{TotalKewajiban}{Ekuitas}$$

3.4.3.2. Ukuran perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan pada dasarnya membagi perusahaan ke dalam kelompok yang berbeda perusahaan besar, menengah dan kecil. Ukuran perusahaan mendefinisikan skala yang digunakan untuk menggambarkan ukuran perusahaan berdasarkan total aset perusahaan. (Suwito, 2005). Dibandingkan dengan perusahaan kecil, perusahaan besar memiliki banyak keunggulan. Pertama, besar kecilnya suatu perusahaan dapat menentukan seberapa mudah mengumpulkan dana di pasar modal. Kedua, kekuatan tawar menawar (*bargaining power*) keuangan ditentukan oleh ukuran perusahaan. Ketiga, efek di mana semakin besar perusahaan, semakin besar pula laba yang diperoleh (Sawir, 2005).

Saat meneliti ukuran perusahaan, tolok ukur aset dapat digunakan. Karena total aset perusahaan besar itu dapat disederhanakan dengan mengubahnya menjadi logaritma natural. (Ghozali, 2013). Penggunaan logaritma natural ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya. Dihitung dengan:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = (\text{Ln}) \text{ Total Aset}$$

3.5 Metode Analisis

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif didasarkan pada *mean*, deviasi standar, varians, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (*kemencengan distribusi*) untuk memberikan pemahaman atau deskripsi dari data yang ditampilkan. (Ghozali, 2013).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam penelitian yang menggunakan *statistic parametric* dengan model analisis regresi linear berganda (Dharma dan Suardana, 2014). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi apakah sampel yang digunakan berdistribusi normal. Normalitas ditentukan dengan mengamati sebaran data (titik) pada diagonal grafik normal P-P Plot (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Dalam model regresi linear, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* (ϵ) yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of*

Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. Menurut Santoso (2012) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymptotic Significance*), yaitu:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

3.5.2.1. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Uji multikolinearitas diperlukan untuk mendeteksi ada tidaknya variabel bebas yang mempunyai kemiripan dengan variabel bebas lain dalam suatu model. Kemiripan antara variabel bebas dalam suatu model akan mendatangkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain. Ketika ada korelasi, muncul masalah multikolinearitas. Jika terdapat multikolinearitas yang terbaik adalah mengecualikan salah satu variabel independen yang ada dari model lalu mengulangi model regresi tersebut lagi. (Santoso, 2012).

Model regresi yang baik menurut Ghozali (2013) seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Adanya *multikolinearitas* dapat dilihat dari *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan *VIF* > 10 , terjadi multikolinearitas

- b. Jika nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 , tidak terjadi multikolinearitas

3.5.2.2.Heteroskedastisitas

Untuk memahami apakah terdapat ketidaksamaan tetap pada varian residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi yang disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas adalah tujuan dari uji heteroskedastisitas.(Ghozali, 2013).Dasar analisis uji heteroskedastisitas:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji *rank-Spearman* yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual (*error*) (Gujarati, 2013).Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.Uji ini menggunakan kaidah korelasi *ranking spearman (Spearman Rank Correlation)*.Bila nilai probabilitas (*sig*) $>0,05$, maka tidak terjadi indikasi heteroskedastisitas.

3.5.3. Uji Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan Uji Analisis Regresi Berganda untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

apakah masing-masing variabel akan bernilai positif atau negatif. Analisis ini menggunakan software SPSS sebagai pengolah datanya.

Berdasarkan penggunaan variabel dependen dan independen dapat disusun persamaan sebagai berikut:

Model Regresi 1:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol sebagai perbandingan, maka persamaan yang digunakan dapat disusun sebagai berikut:

Model Regresi 2:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 K_1 + \beta_5 K_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Regresi

X_1 = Kepemilikan Keluarga

X_2 = *Return On Assets (ROA)*

X_3 = Koneksi Politik

K_1 = *Leverage*

K_2 = Ukuran Perusahaan

ϵ = Error



3.5.4. Uji Kelayakan Model

3.5.4.1. Analisis Koefisien Determinan

Koefisien determinasi (R^2) yaitu mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menggambarkan perbedaan variabel dependen (Sugiyono, 2016). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil bermakna kemampuan variabel-variabel independen dalam memaparkan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu bermakna variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mengantisipasi variasi variabel dependen.

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1. Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y, maka digunakan statistik uji t (Sugiyono, 2016). Pengelolaan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi *software IBM SPSS Statistics* agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat.

Pengujian hipotesis secara parsial (Uji statistik t) yaitu sebagai berikut:

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_1: \beta_1 \neq 0$, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel

dependen.

Uji signifikansi terhadap hipotesis tersebut ditentukan melalui uji t dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- Tolak H_0 : jika t hitung $>$ nilai t tabel.
- Terima H_0 : jika t hitung $<$ nilai t tabel.

Bila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa efek variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Sedangkan penolakan H_0 menunjukkan efek yang signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap suatu variabel dependen.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Objek Penelitian

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur dengan manajemen keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Sampel pada penelitian ini telah sebanyak 75 Perusahaan manufaktur yang telah dipilih menggunakan metode *purposive sampling*.

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018	160
2	Perusahaan manufaktur yang melakukan akuisisi maupun merger	(68)
3	Perusahaan yang kepemilikan keluarga tidak lebih dari 5%	(7)
4	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap periode 2016-2018 dan tidak memiliki informasi yang lengkap tentang data-data penelitian ini	(10)
Jumlah sampel akhir		75
Jumlah sampel selama 3 tahun		225

Tabel 4.1 Data Jumlah Sampel

4.2 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian dengan menunjukkan nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum dan standar deviasi.

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Kepemilikan Keluarga (X1)	.00	1.00	.9867	.11495
Return On Asset (X2)	-2.65	.53	.0436	.20926
Koneksi Politik (X3)	.00	1.00	.1467	.35456
Leverage (K1)	-1.59	11.10	1.3131	1.54155
Ukuran Perusahaan (K2)	11.14	14.10	12.3873	1.06515
Tax Avoidance (Y)	-32.19	5.55	-.3397	2.23480

Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 225 sampel perusahaan pada tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. *Tax Avoidance* memiliki nilai minimum sebesar -32.19, nilai maksimum sebesar 5.55, nilai rata-rata sebesar -0.3397 dan standar deviasi sebesar 2.23480
2. Kepemilikan Keluarga memiliki nilai minimum sebesar 0.00, nilai maksimum sebesar 1.00, nilai rata-rata sebesar 0.9867 dan standar deviasi sebesar 0.11495
3. *Return On Asset* memiliki nilai minimum sebesar -2.65, nilai maksimum sebesar 0.53, nilai rata-rata dari sebesar 0.0436 dan standar deviasi sebesar 0.20926
4. Koneksi Politik memiliki nilai minimum sebesar 0.00, nilai maksimum sebesar 1.00, nilai rata-rata sebesar 0.1467 dan standar deviasi sebesar 0.35456

5. *Leverage* memiliki nilai minimum sebesar -1.59, nilai maksimum sebesar 11.10, nilai rata-rata sebesar 1.3131 dan standar deviasi sebesar 1.54155
6. Ukuran Perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 11.14, nilai maksimum sebesar 14.10, nilai rata-rata sebesar 12.3873 dan standar deviasi sebesar 1.06515

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya residual yang berdistribusi normal dalam variabel independen dan variabel dependen pada suatu model regresi. Uji normalitas perlu dilakukan dikarenakan penelitian tersebut menggunakan data sekunder. Pengujian normalitas data menggunakan *one sample Kolmogorov-Smirnov*.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
n		225
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0088781
	Std.Deviation	.43253526
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		1.312
Asymp.Sig.(2-tailed)		.064

Tabel 4.3 Uji Normalitas

Tabel di atas berisi hasil uji normalitas setelah dilakukan transformasi data dan menunjukkan hasil data berdistribusi normal karena

Perolehan nilai asymp.*Sig.(2-tailed)* sebesar 0.064 nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Dengan demikian uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Apabila nilai toleransi kurang dari 0,1 dan atau nilai VIF melebihi 10 maka artinya terdapat multikolinearitas di antara variabel bebas.

Variabel	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Kepemilikan Keluarga (X1)	.941	1.063	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Return On Asset (X2)	.993	1.007	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Koneksi Politik(X3)	.937	1.067	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Leverage (K1)	.991	1.009	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Ukuran Perusahaan (K2)	.994	1.006	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Pada tabel di atas menunjukkan variabel Kepemilikan Keluarga, ROA, Koneksi Politik, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan mempunyai nilai *tolerance* di atas 0.1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10 yang berarti tidak terdapat korelasi di antara variabel tersebut.

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi.

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Kepemilikan Keluarga (X1)	.330	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Return On Asset (X2)	.194	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Koneksi Politik(X3)	.107	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Lverage (K1)	.634	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Ukuran Perusahaan (K2)	.668	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas

Dilakukan uji menggunakan Uji Glejser dengan pengukuran apabila nilai signifikan melebihi 0,05 maka tidak ada heteroskedastisitas. Menurut tabel Uji Glejser di atas variable-variabel tidak memiliki heteroskedastisitas.

4.4 Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan keluarga, ROA, koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.615	.422		-1.457	.146
Kepemilikan Keluarga (X1)	.638	.207	.206	3.078	.002
Return On Asset (X2)	.414	.141	.192	2.944	.004
Koneksi Politik(X3)	.136	.093	.098	1.454	.147
Leverage (K1)	-.005	.065	-.005	-.075	.940
Ukuran Perusahaan (K2)	-.069	.257	-.017	-.268	.789

Tabel 4.6 Uji Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel, diketahui persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Tax Avoidance} = -0.615 + 0.638X_1 + 0.414X_2 + 0.136X_3 - 0.005K_1 - 0.069K_2$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstanta bernilai sebesar -0.615. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila besarnya nilai Kepemilikan keluarga, ROA, Koneksi Politik, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan adalah 0, maka pengungkapan *Tax Avoidance* adalah turun sebesar 0.515.
2. Kepemilikan keluarga bernilai 0.638 secara parsial berpengaruh positif terhadap tax avoidance karena nilai sig. < 0.05 dan t statistik bernilai positif.
3. ROA bernilai 0.414 secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena nilai sig. < 0.05 dan t statistik bernilai positif

4. Koneksi politik bernilai 0.136 secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai sig.> 0.05.
5. Leverage bernilai 0.005 secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai sig.> 0.05
6. Ukuran perusahaan bernilai 0.069 secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai sig.> 0.05

4.5 Analisis Koefisien Determinan

Koefisien determinasi (R^2) yaitu mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sugiyono, 2016). Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Hasil uji koefisien determinan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.276 ^a	.076	.064	.37993	1.839

a. Predictors: (Constant), Koneksi Politik, Return On Asset, Kepemilikan Keluarga

Tabel 4.7 Uji Analisis Koefisien Determinan

Besar pengaruh Koneksi Politik, Return On Asset, Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.064 adalah 0.064 atau 6.4%. Artinya 6.4% Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh Koneksi Politik, Return On Asset (ROA) dan

Kepemilikan keluarga, sisanya 93.6% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW *test*) pada tabel menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1.839. Selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan menggunakan tabel *Durbin-Watson* pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah sampel sebanyak 225 (N=225) dan jumlah variabel independen atau bebas sebesar 3 (K=3), maka diperoleh nilai dU sebesar 1.7990 dan nilai dW sebesar 1.839.

Jika $dU < dW < 4-dU$ maka tidak terjadi autokorelasi. Dari hasil perhitungan pada tabel yaitu $dU < dW < 4-dU$ yakni $1.7790 < 1.839 < 2.201$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi yang berarti tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t sebelumnya.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1. Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y, maka digunakan statistik uji t (Sugiyono, 2016). Variabel mempunyai pengaruh apabila nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.615	.422		-1.457	.146
Kepemilikan Keluarga (X1)	.638	.207	.206	3.078	.002
Return On Asset (X2)	.414	.141	.192	2.944	.004
Koneksi Politik(X3)	.136	.093	.098	1.454	.147
Leverage (K1)	-.005	.065	-.005	-.075	.940
Ukuran Perusahaan (K2)	-.069	.257	-.017	-.268	.789

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial

Tabel 4.9 di atas menunjukkan hasil hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak

$H_0: \beta_1 = 0$, artinya kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

$H_1: \beta_1 \neq 0$, artinya kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan perolehan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $3.078 > t$ tabel 1.97910 dan nilai signifikansi (Sig.) $0.002 < 0.05$. Maka, disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya kepemilikan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap penghindaran pajak

$H_0: \beta_2 = 0$, artinya *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

$H_1: \beta_2 \neq 0$, artinya *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan perolehan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $2.944 > t$ tabel 1.97910 dan nilai signifikansi (Sig.) $0.004 < 0.05$. Maka, disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ROA berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Koneksi Politik terhadap penghindaran pajak

$H_0: \beta_3 = 0$, artinya Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

$H_1: \beta_3 \neq 0$, artinya Koneksi Politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan perolehan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $1.454 < t$ tabel 1.97910 dan nilai signifikansi (Sig.) $0.147 > 0.05$. Maka, disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Koneksi Politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak

$H_0: \beta_3 = 0$, artinya *Leverage Tidak* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

$H_1: \beta_3 \neq 0$, artinya *Leverage Berpengaruh* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan perolehan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $-0.075 < t$ tabel 1.97910 dan nilai signifikansi (Sig.) $0.940 > 0.05$. Maka, disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya *Leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak

$H_0: \beta_3 = 0$, artinya Ukuran Perusahaan Tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

$H_1: \beta_3 \neq 0$, artinya Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan perolehan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $-0.268 < t$ tabel 1.97910 dan nilai signifikansi (Sig.) $0.789 > 0.05$. Maka, disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.7 Pembahasan

4.7.1. Kepemilikan Keluarga

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai β_1 sebesar 0.638 yang setara dengan kenaikan satu satuan kepemilikan keluarga dengan asumsi bahwa variabel independen lain adalah tetap. Hasil olah data dengan regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar $3.078 > t$ tabel 1.97910 dan nilai signifikansi (Sig.) $0.002 < 0.05$

dengan *level of significant* sebesar 5%, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya kepemilikan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wirdyaningsih dkk (2018), Gaaya, dkk (2017), dan Wijayani (2016) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dikatakan memegang kepemilikan keluarga apabila pimpinan atau keluarga memegang lebih dari 20% hak suara. Oktavia (2018) mengemukakan bahwa salah satu cara mengetahui bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga yaitu nama direksi dan anggota dewan direksi perusahaan biasanya mencakup anggota keluarga di perusahaan dan dewan direksi, serta jabatan struktural di anak perusahaan karena kepemilikan keluarga. Berdasarkan teori agensi jika dihubungkan dengan penghindaran pajak, diketahui bahwa apabila pengelolaan terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik yang mengakibatkan kerugian berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini ini mengimplikasikan bahwa perusahaan keluarga akan melakukan hal yang positif dengan cara menghindari konflik dengan aparat perpajakan dengan cara mematuhi peraturan perpajakan tanpa melakukan *tax avoidance* yang bertujuan agar perusahaan tidak mengalami pemberitaan yang negatif.

Jacob (2014) memaparkan penghindaran pajak sebagai langkah cermat perusahaan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak

dengan memanfaatkan hukum perpajakan yang terdapat celah. Penghindaran pajak disebut juga *tax avoidance* dan berbeda dengan penggelapan pajak atau *tax evasion*. Penghindaran pajak adalah legal karena tidak melanggar hukum, sedangkan penggelapan pajak adalah ilegal karena dilakukan dengan melanggar peraturan atau hukum yang perpajakan.

Menurut Wardaningsih (2018) menyatakan bahwa Perusahaan Keluarga memiliki ciri yaitu kepemilikan dan keterlibatan signifikan keluarga dalam manajemen. Anggota keluarga akan menentukan kepemimpinan (*leadership*) dan pengawasan (*control*) dilakukan oleh keluarga. Pengambilan keputusan dan kebijakan serta penyusunan strategi dan agenda kegiatan bisnis sehari-hari akan dilakukan oleh keluarga. Penekanan ada pada pengawasan dan berperan aktif.

Kepemilikan keluarga yang kuat akan mengambil keputusan agar memperoleh manfaat dengan cara mengorbankan pemegang saham *eksternal*. Mereka cenderung dan bahkan menekankan untuk melakukan *tax-saving* dan menaikkan harga sewa (Stejivers dan Niskanen, 2014).

4.7.2. Return On Assets (ROA)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai β_2 sebesar 0.414 yang setara dengan kenaikan satu satuan ROA dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tetap. Hasil olah data dengan regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar $2.944 > t$ tabel 1.97910 dan nilai signifikansi (Sig.) $0.004 < 0.05$ dengan *level of significant* sebesar

5%, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya ROA berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wirdaningsih dkk (2018) dan Fadila (2017) di mana pada penelitian mereka menunjukkan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan.

Teori keagenan (*agency theory*) menerangkan hubungan antara *agent* (manajemen) dan *principal* (pemilik) yang timbul karena masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Widyawati, 2013). Menurut Darmadi (2013) Perusahaan berpenghasilan tinggi dan berkinerja tinggi umumnya memiliki beban pajak yang lebih rendah karena perusahaan berpenghasilan tinggi melakukan pemotongan pajak dan tindakan pengurangan pajak lainnya. Semakin tinggi ROA semakin tinggi keuntungannya. Perusahaan dapat memposisikan labanya yang tinggi dalam pengelolaan pajak untuk mengurangi beban pajaknya.

ROA adalah profitabilitas yang menggambarkan performa keuangan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pakai menggunakan aset perusahaan. Manajemen aset yang baik dapat menguntungkan perusahaan dengan memberi mereka insentif pajak. Penyusutan atas pengeluaran untuk mendapatkan harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk mendapatkan hak dan atas biaya.

4.7.3. *Koneksi Politik*

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai β_3 sebesar 0.136 yang setara dengan kenaikan satu satuan koneksi politik maka variabel penghindaran pajak akan turun sebesar 0.136. Hasil olah data dengan regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar $1.454 < t$ tabel 1.97910 dan nilai signifikansi (Sig.) $0.147 > 0.05$ dengan *level of significant* sebesar 5%, maka disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjondro (2014) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2017) yang menunjukkan hasil bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini dimungkinkan karena wajib pajak dan pajak memiliki tujuan yang berbeda dan setiap orang ingin tujuan mereka konsisten. Perbedaan inilah yang menciptakan konflik kepentingan. Wajib pajak berharap untuk mengurangi pajak seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan pengembalian investasi tercepat. Sedangkan pihak perpajakan (pemerintah) ingin kepentingannya terpenuhi yaitu bagaimana agar kas Negara mendapatkan masukan semaksimal mungkin untuk keberlangsungan operasional pemerintah. Maka dari itu beberapa perusahaan menjadikan koneksi politik sebagai kondisi di mana terjalinnya suatu hubungan pihak tertentu dengan

pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal demi kepentingan kedua belah pihak (Purwati dan Sugiyarti 2017).Manfaat lain yang dapat diraih dengan koneksi politik ini adalah adanya hak eksklusif yang diberikan kepada perusahaan.Misalnya, jika terjadi krisis ekonomi, Negara akan memberikan bantuan dana.(Butje dan Tjondro, 2014).

Audit pajak rendah menjadi manfaat bagi perusahaan yang memiliki koneksi politik.Disaatperusahaan mendapat kepercayaan dari pemerintah maka dianggap tidak akan mengelak dari pajak karena risiko penghindaran pajak tergolong rendah.Artinya koneksi politik tidak berpengaruh pada penghindaran pajak karena tarif pajak perusahaan sudah rendah, dan hubungan dengan koneksi ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari penghindaran pajak.Hal lain yang memengaruhi koneksi politik yang berpengaruh negatif dikarenakan peraturan perpajakan yang mengatur tentang transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pasal 18 ayat 3 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.Selain itu, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah (BUMN/ BUMD) merupakan wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010.

4.7.4. *Leverage*

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai β_4 sebesar -0.005 yang setara dengan kenaikan satu satuan *leverage* maka variabel penghindaran pajak akan turun sebesar 0.005. Hasil olah data dengan regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar $-0.075 < t$ tabel 1.97910 dan nilai signifikansi (Sig.) $0.940 > 0.05$. Maka, disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya *leverage tidak* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dan Muid (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2017) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini kemungkinan karena indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari keputusan pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah apakah perusahaan lebih menggunakan pendanaan dari sisi hutang atau ekuitas. Beban bunga yang timbul dari penggunaan hutang ini mungkin merupakan pengurangan saat menghitung laba kena pajak, tetapi dividen tidak diperhitungkan, sehingga perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah (Noviyani, 2019).

4.7.5. Ukuran Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai β_5 sebesar -0.069 yang setara dengan kenaikan satu satuan ukuran perusahaan maka variabel penghindaran pajak akan turun sebesar 0.069. Hasil olah data dengan regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar $-0.268 < t \text{ tabel } 1.97910$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0.789 > 0.05$. Maka, disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak Artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2017) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) yang mengungkapkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini kemungkinan karena kewajiban perusahaan dalam pembayaran pajak tidak diukur dari ukuran perusahaan tersebut karena membayar pajak adalah sebuah kewajiban baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar hal ini berarti ukuran perusahaan tidak memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga dan *return on asset* serta koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepemilikan keluarga dan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2016-2018. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar kepemilikan keluarga pada perusahaan manufaktur maka semakin besar pula penghindaran pajak dapat terjadi. Sedangkan untuk pengaruh *Return On Assets* (ROA) diartikan bahwa semakin tinggi ROA maka perencanaan yang dibuat oleh perusahaan akan dilakukan dengan lebih matang yang menghasilkan pengaturan pajak yang optimal.
2. Koneksi Politik, *leverage* dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2016-2018.

5.2 Saran

1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi untuk penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan modifikasi dengan menambahkan variabel potensial lainnya diluar variabel pada penelitian ini, seperti komisaris independen, kompensasi rugi fiskal, *profitability*, karakter eksekutif, kualitas audit, *sales growth* dan variabel lainnya. Penelitian selanjutnya juga bisa mencantumkan periode penelitian pada rentang waktu yang lebih lama agar hasil penelitian bisa mewakili populasi yang digeneralisasi, menggunakan perusahaan lain selain perusahaan manufaktur, misalnya perusahaan yang berkecimpung dalam bidang jasa perbankan, telekomunikasi atau bisa di semua sektor perusahaan sehingga tidak terbatas hanya pada perusahaan manufaktur.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada perusahaan manufaktur tetapi dapat juga berpengaruh pada perusahaan lainnya yang terdaftar di BEI. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada perusahaan tentang praktik penghindaran pajak.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan dalam bidang pajak terutama yang berkaitan dengan pajak badan agar perusahaan tidak lagi memiliki celah dalam praktik penghindaran pajak.

Daftar Pustaka

- Aditama, F. d. (2014). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan NonManufaktur Yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia. *Modus Journal*, 26 (1), 33-50.
- Alviyani, K. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Perhindaran Pajak. *JOM Fekon*, 3 (1), 2540-2554.
- Annisa. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, 4 (1), 685-698.
- Asri, I. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Resiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Universitas Udayana*, 16 (1), 74-100.
- Brotodiharjo, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Butje, d. E. (2014). *Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. Surabaya: Skripsi Universitas Kristen Petra.
- Chen, s. X. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95, 41-61.
- Cleassens, S. d. (2012). Corporate Governance in Emerging Market: A Survey. *Emerging Market Review*, 15 (0), 1-33.
- Darmadi, I. N. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak efektif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (4), 1-12.
- Darmawan, G. H. (2014). PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE, RETURN ON ASSETS, DAN UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGHINDARAN PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9 (1), 143-161.
- Dharma, G. P. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6 (1), 340-353.
- Dwipoyono, Y. P. (2013). *Pengaruh Family Ownership Terhadap Firm Performance Pada Badan Usaha Yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2010*. Surabaya: Skripsi Universitas Surabaya.

- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, 4 (1), 1671-1684.
- Forum, P. (2016, Februari 19). <https://forumpajak.org/ikea-terjerat-kasus-penghindaran-pajak/>. Retrieved Maret 23, 2021
- Gaaya, dkk, S. d. (2017). Does Family Ownership Reduce Corporate Tax Avoidance? The Moderating Effect of Audit Quality. *Managerial Auditing Journal*, 32 (7), 731-744.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadi, N. (2013). *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hartadinata, O. S. (2013). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Aggressiveness pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2 (3), 48-59.
- Herawaty, S. d. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII* .
- Inanda, T. U. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimoderasi Oleh Corporate Governance dan Kepemilikan Mayoritas. *Jurnal Akuntansi*, 13 (2), 126-145.
- Indirawati, T. &. (2019). Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan menggunakan Strategi Bisnis sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2 (4), 1-8.
- J.Supranto. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Jacob, F. O. (2014). An Emperical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5 (18), 22-27.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mahaputra, I. N. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1 (2), 167-193.

- Mulyani, D. d. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2 (1), 1-9.
- Ngadiman, d. P. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Konstitusional dan ukuran perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 18 (3), 408-421.
- Noviyani, E. d. (2019). PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8 (3), 1-11.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Akuntansi Bisnis*, 15 (1), 23-40.
- Oktavia, R. (2018). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kontrol Keluarga Pemilik, dan Manajemen Keluarga Pemilik Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi informasi (JATI)*, 12 (1), 112-134.
- Perdana, I. B. (2011). Analysis of The Impacts of Family Ownership on a Company's Costs of Debt. *International Journal of Administrative Science & Organization Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 2 (2), 143-156.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan : Starategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Purnamasari, L. (2018). *Pengaruh Family Ownership dan Proporsi Anggota Keluarga pada Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan* . Lampung: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Purwanti, S. M. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 5 (3), 1625-1642.
- Putri, V. R. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya* .
- Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Sawir, A. (2005). *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Steijvers, T. &. (2014). Tax aggressiveness in private family firms: An agency perspective. *Journal of Family Business Strategy*, 5 (4), 347-357.
- Subagiastra, K. d. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Ilmiah Akuntansi* .
- Sugiyono. (2016). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukartha, D. d. (2014). *Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Return on Asset dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. Bali: Universitas Udayana.
- Surbakti, T. A. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta* .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Utami, N. W. (2013). *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilas Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Solo: Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Warsini, S. (2014). Income shifting sebagai reaksi terhadap perubahan tarif pajak. *Simposium Nasional* .
- Widyawati, A. d. (2013). *Pengaruh Konvergensi IFRS Efektif Tahun 2011, Kompleksitas Akuntansi, dan Probilitas Kebangkrutan Perusahaan Terhadap Timeliness dan Manajemen Laba*. Manado: SNA XVI.
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaraan Pajak Di Indonesia. *JDEB*, 13 (2), 181-192.
- Wiranata, Y. A. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Akuntansi dan Keuangan*, 15 (1), 15-26.

Wirdaningsih, R. N. (2018). Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dengan efektivitas komisaris independen dan kualitas audit sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 7 (1), 15-29.

Zulma, G. W. (2016). Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.

www.ifc.org

<http://iicd.or.id/>

www.idx.co.id



LAMPIRAN I

Daftar Nama Perusahaan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADMG	Polychem Indonesia
2	AISA	Tiga Pilar Sejartera Food
3	AKPI	Argha Karya Prima
4	ALDO	Alkindo Naratama

5	ALKA	Alaska Industrindo
6	ALMI	Alumindo Light Metal Industry
7	APLI	Asiaplast Industries
8	BRAM	Indo Kordsa
9	BRNA	Berlina Tbk
10	BRPT	Barito Pacific
11	BTON	Betonjaya Manunggal
12	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia
13	CPIN	Charoesn Pokhphand
14	CTBN	Citra Tubindo
15	DVLA	Darya Varia Laboratori
16	GDST	Gunawan Dianjaya Stell
17	GDYR	Goodyear Indoinesia
18	GGRM	Gudang Garam
19	GJTL	Gajah Tunggal
20	HDTX	Panasia Indo Resources
21	HMSP	HM Sampoerna
22	ICBP	Indofood Cpb Sukses Makmur
23	IGAR	Champion Pacific Indonesia
24	IMAS	Indomobil Sukses International
25	INAF	Indofarma (Persero)
26	INAI	Indal Aluminium Industry

27	INCI	Intanwijaya International
28	INDR	Indorama Synthetics
29	INDS	Indosring
30	INKP	Indah iat Pulp & Paper
31	INRU	Toba Pulp & Paper
32	INTP	Indocement Tunggal Prakasa
33	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry
34	JPFA	Japha Comfeed
35	KBLM	Kabelindo Murni
36	KRAH	PT Grand Kartech Tbk
37	KICI	Kedaung Indah Can
38	KLBF	Kalbe Farma
39	LION	Lion Metal Works
40	LMPI	Langgeng Makmur
41	MAIN	Malindo Feedmill
42	MASA	Multistrada Arah Sarana
43	MBTO	Martina Berto
44	MLBI	Multi Bintang Indonesia
45	MLIA	Mlia Industrindo
46	MRAT	Mustika Ratu
47	MYOR	Mayora Indonesia
48	NIKL	Plat Timah Nusantara

49	PBRX	Pan Brothers
50	PTSN	Sat Nusapersada
51	PYFA	Pyridam Farma
52	RICY	Ricky Putra Globalindo
53	ROTI	Nippon Indosari Corpindo
54	SCCO	Supreme Cable Manufacturing & Commerce
55	SIPD	Sierad Product
56	SKBM	Sekar Bumi Tbk
57	SKTL	Sekar Laut Tbk
58	SMCB	Holcim Indonesia
59	SMSM	Selamat Sempurna
60	SPMA	Suparma Tbk
61	SRIL	Sri Rejeki Isman
62	SRSN	Indo Acitama
63	SSTM	Sunson Textile Manufacture
64	TBMS	Tembaga Mulia Semanan
65	TFCO	Tifico Fiber Indonesia
66	TIRT	Tirta Mahakam Resources
67	TOTO	Surya Toto Indonesia
68	TRIS	Trisula International
69	TRST	Trias Sentosa
70	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry

71	UNIC	Unggul Indah Cahaya
72	UNVR	Unilever Indonesia
73	VOKS	Voksel Electric
74	WIIM	Wismilak Inti Makmur
75	YPAS	Yanaprima Hastapersada



LAMPIRAN II

Data Variabel Penelitian Sebelum Transformasi Data

No	Nama Perusahaan	Tahun	Penghindaran Pajak	Kepemilikan Keluarga	ROA	Koneksi Politik	Leverage	Size
1	ADMG	2016	-0.27	1.00	-0.06	.00	.55	12.71
		2017	-0.50	1.00	.00	.00	.56	13.57
		2018	-0.59	1.00	.00	.00	.15	12.61
2	AISA	2016	-0.20	1.00	.08	1.00	1.17	12.97

		2017	.01	1.00	-2.65	1.00	-1.59	12.30
		2018	.44	1.00	-.06	1.00	-1.53	12.26
3	AKPI	2016	-.31	1.00	.01	.00	1.34	12.42
		2017	-.58	1.00	.01	.00	1.44	12.44
		2018	-.30	1.00	.04	.00	1.49	12.49
4	ALDO	2016	-.26	1.00	.06	.00	1.04	11.61
		2017	-.25	1.00	.06	.00	1.17	11.70
		2018	-.26	1.00	.08	.00	.94	11.72
5	ALKA	2016	.87	1.00	.00	.00	1.24	11.14
		2017	-.04	1.00	.05	.00	2.89	11.49
		2018	.00	1.00	.04	.00	5.44	11.81
6	ALMI	2016	.10	1.00	-.05	.00	4.33	12.33
		2017	.79	1.00	.00	.00	5.27	12.38
		2018	-.53	1.00	.00	.00	7.50	12.44
7	APLI	2016	-.25	1.00	.07	.00	.44	11.58
		2017	-.30	1.00	.03	.00	.76	11.60
		2018	.19	1.00	-.05	.00	1.46	11.70
8	BRAM	2016	-.28	1.00	.08	.00	.50	12.60
		2017	-.28	1.00	.10	.00	.40	12.62
		2018	-.29	1.00	.09	.00	.35	12.63
9	BRNA	2016	1.00	1.00	-.01	.00	1.03	12.32
		2017	-.21	1.00	-.09	.00	1.30	12.29
		2018	.12	1.00	.11	.00	1.19	12.39
10	BRPT	2016	-.26	1.00	.11	.00	.78	13.54
		2017	-.36	1.00	.05	.00	1.57	13.97
		2018	-.43	1.00	.04	.00	1.61	14.01
11	BTON	2016	-.27	1.00	-.03	.00	.24	11.25
		2017	-.23	1.00	.06	.00	.19	11.26
		2018	-.19	1.00	.13	.00	.19	11.34

12	CEKA	2016	-0.13	1.00	.17	.00	.61	12.15
		2017	-0.25	1.00	.08	.00	.54	12.14
		2018	-0.25	1.00	.09	.00	.20	12.07
13	CPIN	2016	-0.44	1.00	.09	.00	.71	13.38
		2017	-0.23	1.00	.10	.00	.56	13.39
		2018	-0.23	1.00	.17	.00	.43	13.44
14	CTBN	2016	.17	1.00	.00	.00	.36	12.33
		2017	-0.23	1.00	-0.08	.00	.42	12.31
		2018	-0.22	1.00	-0.01	.00	.58	13.19
15	DVLA	2016	-0.29	1.00	.10	.00	.42	12.19
		2017	-0.28	1.00	.09	.00	.47	12.22
		2018	-0.27	1.00	.12	.00	.40	12.23
16	GDST	2016	-0.30	1.00	.02	.00	.51	12.10
		2017	-0.60	1.00	.00	.00	.35	12.14
		2018	-0.31	1.00	-0.06	.00	.51	12.13
17	GDYR	2016	-0.36	1.00	.01	.00	1.01	12.18
		2017	2.36	1.00	-0.02	.00	1.31	12.22
		2018	-0.51	1.00	.01	.00	1.32	12.26
18	GGRM	2016	-0.25	1.00	.11	.00	.59	13.80
		2017	-0.26	1.00	.12	.00	.58	13.83
		2018	-0.26	1.00	.12	.00	.53	13.84
19	GJTL	2016	-0.24	1.00	.02	.00	2.20	13.27
		2017	-0.58	1.00	-0.01	.00	2.20	13.26
		2018	-0.13	1.00	.01	.00	2.36	13.30
20	HDTX	2016	-0.22	1.00	-0.08	.00	3.03	12.68
		2017	.21	1.00	-0.21	.00	11.10	12.61
		2018	-0.35	1.00	-0.38	.00	3.31	11.77
21	HMSP	2016	-0.25	1.00	.30	.00	.24	13.63
		2017	-0.25	1.00	.29	.00	.27	13.64
		2018	-0.25	1.00	.29	.00	.32	13.67

22	ICBP	2016	-0.27	1.00	.13	.00	.56	13.46
		2017	-0.32	1.00	.11	.00	.56	13.50
		2018	-0.28	1.00	.15	.00	.51	13.54
23	IGAR	2016	-0.28	1.00	.17	.00	.18	11.64
		2017	-0.24	1.00	.14	.00	.16	11.71
		2018	.00	1.00	.08	.00	.18	11.76
24	IMAS	2016	.38	1.00	.00	.00	2.82	13.41
		2017	-1.39	1.00	.08	.00	2.38	13.50
		2018	-0.65	1.00	.02	.00	2.97	13.61
25	INAF	2016	-0.08	1.00	-0.02	1.00	1.40	12.14
		2017	-0.19	1.00	-0.03	1.00	1.91	12.19
		2018	.29	1.00	-0.02	1.00	1.90	12.16
26	INAI	2016	-0.39	1.00	.02	.00	4.19	12.13
		2017	-0.26	1.00	.03	.00	3.38	12.08
		2018	-0.38	1.00	.03	.00	3.61	12.15
27	INCI	2016	-0.25	1.00	.34	.00	.11	11.43
		2017	-0.25	1.00	.08	.00	.13	11.48
		2018	-0.24	1.00	.14	.00	.22	11.59
28	INDR	2016	-0.83	1.00	.00	.00	1.78	13.06
		2017	-0.84	1.00	.00	.00	1.93	13.04
		2018	-0.13	1.00	.08	.00	1.16	13.07
29	INDS	2016	-0.18	1.00	.06	.00	.20	12.39
		2017	-0.29	1.00	.05	.00	.14	12.39
		2018	-0.25	1.00	.05	.00	.13	12.40
30	INKP	2016	.40	1.00	.03	.00	1.44	13.97
		2017	-0.10	1.00	.05	.00	1.37	14.02
		2018	-0.20	1.00	.07	.00	1.32	14.10
31	INRU	2016	-3.92	1.00	.11	.00	1.09	12.66
		2017	-0.05	1.00	.08	.00	1.06	12.66
		2018	-0.14	1.00	.01	.00	1.42	12.78

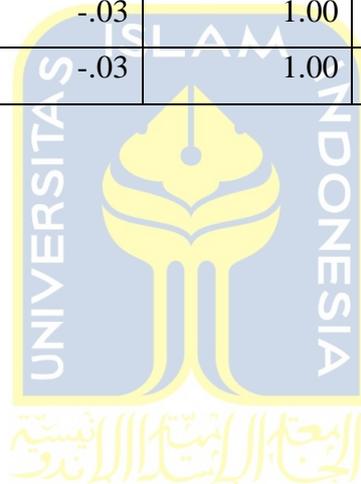
32	INTP	2016	-07	1.00	.13	.00	.15	13.48
		2017	-.19	1.00	.06	.00	.18	13.46
		2018	-.18	1.00	.05	.00	.20	13.44
33	IPOL	2016	-.37	1.00	.01	.00	.81	12.58
		2017	-.29	1.00	.02	.00	.81	12.59
		2018	-.34	1.00	.01	.00	.81	12.63
34	JPFA	2016	-.22	1.00	.15	.00	1.18	13.26
		2017	.00	1.00	.05	.00	1.30	13.30
		2018	-.27	1.00	.11	.00	1.26	13.36
35	KBLM	2016	-.43	1.00	.03	1.00	.99	11.81
		2017	-.01	1.00	.39	1.00	.56	12.09
		2018	-.37	1.00	.03	1.00	.58	12.11
36	KRAH	2016	-.81	.00	.00	1.00	2.36	11.78
		2017	.02	.00	-.08	1.00	4.15	11.81
		2018	.00	.00	-.11	1.00	9.32	11.78
37	KICI	2016	-.37	1.00	-.03	.00	.57	11.15
		2017	-.25	1.00	.02	.00	.63	11.17
		2018	-.22	1.00	.02	.00	.63	11.19
38	KLBF	2016	-.24	1.00	.16	.00	.22	13.18
		2017	-.24	1.00	.15	.00	.20	13.22
		2018	-.25	1.00	.14	.00	.19	13.26
39	LION	2016	-.23	1.00	.05	.00	.46	11.84
		2017	-.54	1.00	.00	.00	.51	11.83
		2018	-.39	1.00	.04	.00	.47	11.84
40	LMPI	2016	-.38	1.00	.00	1.00	.99	11.91
		2017	-.10	1.00	-.04	1.00	1.22	11.92
		2018	-.21	1.00	-.06	1.00	1.38	11.90
41	MAIN	2016	-.25	1.00	.06	.00	1.23	12.58
		2017	-.32.19	1.00	.01	.00	1.45	12.60
		2018	-.29	1.00	.07	.00	1.24	12.64

42	MASA	2016	-0.19	1.00	-0.01	.00	.80	12.91
		2017	.11	1.00	-0.01	.00	.96	12.96
		2018	.14	1.00	-0.03	.00	1.02	12.97
43	MBTO	2016	-0.25	1.00	.01	.00	.61	11.85
		2017	-0.22	1.00	-0.04	.00	.89	11.89
		2018	-0.26	1.00	-0.17	.00	1.16	11.81
44	MLBI	2016	-0.26	1.00	.43	.00	1.77	12.36
		2017	-0.26	1.00	.53	.00	1.36	12.40
		2018	-0.27	1.00	.43	.00	1.48	12.46
45	MLIA	2016	-2.02	1.00	.06	.00	3.79	12.89
		2017	-0.06	1.00	.01	.00	1.96	12.72
		2018	-0.29	1.00	.09	.00	1.35	12.72
46	MRAT	2016	.36	1.00	-0.02	.00	.31	11.68
		2017	-0.05	1.00	-0.01	.00	.36	11.70
		2018	-2.20	1.00	.00	.00	.39	11.71
47	MYOR	2016	-0.25	1.00	.10	.00	1.06	13.11
		2017	-0.25	1.00	.11	.00	1.03	13.17
		2018	-0.26	1.00	.10	.00	1.06	13.25
48	NIKL	2016	.03	1.00	.02	.00	1.99	12.21
		2017	-0.06	1.00	.01	.00	2.03	12.23
		2018	-0.13	1.00	.01	.00	2.43	11.14
49	PBRX	2016	-0.27	1.00	.02	.00	1.28	12.84
		2017	-0.29	1.00	.02	.00	1.44	12.89
		2018	-0.21	1.00	.03	.00	1.31	12.92
50	PTSN	2016	-0.31	1.00	.02	.00	.31	11.95
		2017	-0.35	1.00	.00	.00	.33	11.96
		2018	-0.27	1.00	.04	.00	3.13	12.62
51	PYFA	2016	-0.27	1.00	.03	.00	.58	11.22
		2017	-0.26	1.00	.03	.00	.47	11.20
		2018	-0.25	1.00	.05	.00	.57	11.27

52	RICY	2016	-0.40	1.00	.01	.00	2.12	12.11
		2017	-0.36	1.00	.01	.00	2.19	12.14
		2018	-0.38	1.00	.01	.00	2.46	12.19
53	ROTI	2016	-0.24	1.00	.09	.00	1.02	12.47
		2017	-0.27	1.00	.03	.00	.62	12.66
		2018	-0.32	1.00	.03	.00	.51	12.64
54	SCCO	2016	-0.23	1.00	.14	.00	1.01	12.39
		2017	-0.22	1.00	.39	.00	.47	12.60
		2018	-0.26	1.00	.06	.00	.43	12.62
55	SIPD	2016	.53	1.00	.00	.00	1.25	12.41
		2017	.50	1.00	-.16	.00	1.83	12.35
		2018	-.24	1.00	.02	.00	1.60	12.34
56	SKBM	2016	-.27	1.00	.02	1.00	1.72	12.00
		2017	-.19	1.00	.02	1.00	.59	12.21
		2018	-.24	1.00	.01	1.00	.70	12.25
57	SKTL	2016	-.18	1.00	.30	.00	.92	11.76
		2017	-.16	1.00	.02	.00	1.07	11.80
		2018	-.19	1.00	.05	.00	1.20	11.87
58	SMCB	2016	.65	1.00	-.01	.00	1.45	13.30
		2017	.10	1.00	-.04	.00	1.73	13.29
		2018	.21	1.00	-.04	.00	1.91	13.27
59	SMSM	2016	-.24	1.00	.21	.00	.43	12.35
		2017	-.23	1.00	.23	.00	.34	12.39
		2018	-.24	1.00	.23	.00	.30	12.45
60	SPMA	2016	-.27	1.00	.04	.00	1.00	12.33
		2017	-.24	1.00	.04	.00	.86	12.34
		2018	-.25	1.00	.04	.00	.82	12.36
61	SRIL	2016	-.10	1.00	.06	.00	1.86	13.11
		2017	-.06	1.00	.06	.00	1.70	13.21
		2018	-.15	1.00	.06	.00	1.64	13.30

62	SRSN	2016	5.55	1.00	.09	.00	.78	11.86
		2017	-.07	1.00	.02	.00	.57	11.82
		2018	-.24	1.00	.09	.00	.44	11.84
63	SSTM	2016	-.16	1.00	-.03	.00	1.73	11.81
		2017	-.24	1.00	-.04	.00	1.85	11.78
		2018	-.39	1.00	.01	.00	1.61	11.75
64	TBMS	2016	-.25	1.00	.06	.00	3.49	12.24
		2017	-.29	1.00	.05	.00	3.51	12.35
		2018	-.25	1.00	.03	.00	3.45	12.44
65	TFCO	2016	.33	1.00	.02	.00	.11	12.64
		2017	-.47	1.00	.01	.00	.12	12.65
		2018	-4.38	1.00	.00	.00	.09	12.67
66	TIRT	2016	-.22	1.00	.04	.00	5.44	11.91
		2017	-.57	1.00	.01	.00	5.94	11.93
		2018	-.04	1.00	-.04	.00	9.56	11.97
67	TOTO	2016	-.33	1.00	.06	.00	.69	11.58
		2017	-.26	1.00	.09	.00	.67	12.45
		2018	-.23	1.00	.15	.00	.50	12.46
68	TRIS	2016	-.47	1.00	.03	.00	.85	11.81
		2017	-.35	1.00	.04	.00	.53	11.74
		2018	-.19	1.00	.03	.00	.78	11.80
69	TRST	2016	.46	1.00	.00	1.00	.70	12.52
		2017	2.05	1.00	.02	1.00	.69	12.52
		2018	.75	1.00	.04	1.00	.92	12.63
70	ULTJ	2016	-.24	1.00	.17	.00	.22	12.63
		2017	-.31	1.00	.14	.00	.23	12.71
		2018	-.26	1.00	.13	.00	.16	12.75
71	UNIC	2016	.85	1.00	.09	.00	.41	12.48
		2017	-.32	1.00	.06	.00	.41	12.48
		2018	-.39	1.00	.07	.00	.42	12.53

72	UNVR	2016	-0.25	1.00	.36	1.00	2.56	13.22
		2017	-0.25	1.00	.38	1.00	2.66	13.28
		2018	-0.25	1.00	.48	1.00	1.58	13.29
73	VOKS	2016	-0.29	1.00	.10	1.00	1.49	12.22
		2017	-0.28	1.00	.08	1.00	1.59	12.32
		2018	-0.26	1.00	.04	1.00	1.69	12.40
74	WIIM	2016	-0.22	1.00	.07	1.00	.37	12.13
		2017	-0.26	1.00	.02	1.00	.25	12.09
		2018	-0.28	1.00	.02	1.00	.25	12.10
75	YPAS	2016	-0.03	1.00	-0.03	1.00	.97	11.45
		2017	-0.03	1.00	-0.05	1.00	1.39	11.48
		2018	-0.03	1.00	-0.03	1.00	1.80	11.52



LAMPIRAN III

Data Variabel Penelitian Setelah Transform Data

No	Nama Perusahaan	Tahun	Penghindaran Pajak	Kepemilikan Keluarga	ROA	Koneksi Politik	Leverage	Size
1	ADMG	2016	-0.26	.79	-0.06	.00	.50	1.49
		2017	-0.47	.79	.00	.00	.51	1.50
		2018	-0.53	.79	.00	.00	.15	1.49

2	AISA	2016	-0.20	.79	.08	.79	.86	1.49
		2017	.00	.79	-1.21	.79	-1.01	1.49
		2018	.42	.79	-.06	.79	-.99	1.49
3	AKPI	2016	-0.30	.79	.01	.00	.93	1.49
		2017	-.53	.79	.00	.00	.96	1.49
		2018	-.29	.79	.03	.00	.98	1.49
4	ALDO	2016	-.25	.79	.06	.00	.81	1.48
		2017	-.24	.79	.06	.00	.87	1.49
		2018	-.25	.79	.08	.00	.75	1.49
5	ALKA	2016	.71	.79	.00	.00	.89	1.48
		2017	-.04	.79	.05	.00	1.24	1.48
		2018	.00	.79	.03	.00	1.39	1.49
6	ALMI	2016	.10	.79	-.05	.00	1.34	1.49
		2017	.67	.79	.00	.00	1.38	1.49
		2018	-.49	.79	.00	.00	1.44	1.49
7	APLI	2016	-.24	.79	.06	.00	.41	1.48
		2017	-.29	.79	.03	.00	.65	1.48
		2018	.18	.79	-.05	.00	.97	1.49
8	BRAM	2016	-.27	.79	.08	.00	.46	1.49
		2017	-.27	.79	.09	.00	.38	1.49
		2018	-.28	.79	.09	.00	.33	1.49

9	BRNA	2016	.79	.79	.00	.00	.80	1.49
		2017	-.20	.79	-.09	.00	.92	1.49
		2018	.11	.79	.11	.00	.87	1.49
10	BRPT	2016	-.26	.79	.11	.00	.66	1.50
		2017	-.34	.79	.05	.00	1.00	1.50
		2018	-.41	.79	.04	.00	1.01	1.50
11	BTON	2016	-.27	.79	-.03	.00	.23	1.48
		2017	-.22	.79	.06	.00	.18	1.48
		2018	-.19	.79	.13	.00	.18	1.48
12	CEKA	2016	-.13	.79	.17	.00	.54	1.49
		2017	-.24	.79	.07	.00	.50	1.49
		2018	-.24	.79	.09	.00	.19	1.49
13	CPIN	2016	-.41	.79	.09	.00	.62	1.50
		2017	-.23	.79	.10	.00	.51	1.50
		2018	-.23	.79	.16	.00	.40	1.50
14	CTBN	2016	.17	.79	.00	.00	.34	1.49
		2017	-.23	.79	-.08	.00	.40	1.49
		2018	-.22	.79	-.01	.00	.52	1.50
15	DVLA	2016	-.28	.79	.10	.00	.40	1.49
		2017	-.28	.79	.09	.00	.44	1.49
		2018	-.26	.79	.12	.00	.38	1.49

16	GDST	2016	-0.29	.79	.02	.00	.47	1.49
		2017	-0.54	.79	.00	.00	.34	1.49
		2018	-0.30	.79	-0.06	.00	.47	1.49
17	GDYR	2016	-0.34	.79	.01	.00	.79	1.49
		2017	1.17	.79	-0.02	.00	.92	1.49
		2018	-0.47	.79	.01	.00	.92	1.49
18	GGRM	2016	-0.25	.79	.10	.00	.53	1.50
		2017	-0.25	.79	.11	.00	.53	1.50
		2018	-0.25	.79	.11	.00	.49	1.50
19	GJTL	2016	-0.24	.79	.02	.00	1.14	1.50
		2017	-0.52	.79	-0.01	.00	1.14	1.50
		2018	-0.13	.79	.01	.00	1.17	1.50
20	HDTX	2016	-0.22	.79	-0.08	.00	1.25	1.49
		2017	.21	.79	-0.21	.00	1.48	1.49
		2018	-0.34	.79	-0.37	.00	1.28	1.49
21	HMSP	2016	-0.24	.79	.29	.00	.24	1.50
		2017	-0.24	.79	.28	.00	.26	1.50
		2018	-0.24	.79	.28	.00	.31	1.50
22	ICBP	2016	-0.27	.79	.13	.00	.51	1.50
		2017	-0.31	.79	.11	.00	.51	1.50
		2018	-0.27	.79	.15	.00	.47	1.50

23	IGAR	2016	-0.27	.79	.17	.00	.17	1.49
		2017	-0.24	.79	.14	.00	.16	1.49
		2018	.00	.79	.08	.00	.18	1.49
24	IMAS	2016	.36	.79	.00	.00	1.23	1.50
		2017	-0.95	.79	.08	.00	1.17	1.50
		2018	-0.58	.79	.02	.00	1.25	1.50
25	INAF	2016	-0.08	.79	-0.02	.79	.95	1.49
		2017	-0.18	.79	-0.03	.79	1.09	1.49
		2018	1.29	.79	-0.02	.79	1.09	1.49
26	INAI	2016	-0.37	.79	.02	.00	1.34	1.49
		2017	-0.26	.79	.03	.00	1.28	1.49
		2018	-0.36	.79	.03	.00	1.30	1.49
27	INCI	2016	-0.24	.79	.32	.00	.11	1.48
		2017	-0.24	.79	.08	.00	.13	1.48
		2018	-0.24	.79	.13	.00	.22	1.48
28	INDR	2016	-0.69	.79	.00	.00	1.06	1.49
		2017	-0.70	.79	.00	.00	1.09	1.49
		2018	-0.13	.79	.08	.00	.86	1.49
29	INDS	2016	-0.17	.79	.06	.00	.20	1.49
		2017	-0.28	.79	.05	.00	.13	1.49
		2018	-0.25	.79	.05	.00	.13	1.49

30	INKP	2016	.38	.79	.03	.00	.96	1.50
		2017	-.10	.79	.05	.00	.94	1.50
		2018	-.19	.79	.07	.00	.92	1.50
31	INRU	2016	-1.32	.79	-1.21	.00	.83	1.49
		2017	-.05	.79	.08	.00	.81	1.49
		2018	-.14	.79	.01	.00	.96	1.49
32	INTP	2016	-.07	.79	.13	.00	.15	1.50
		2017	-.18	.79	.06	.00	.17	1.50
		2018	-.18	.79	.04	.00	.19	1.50
33	IPOL	2016	-.36	.79	.01	.00	.68	1.49
		2017	-.28	.79	.02	.00	.68	1.49
		2018	-.32	.79	.01	.00	.68	1.49
34	JPFA	2016	-.21	.79	.15	.00	.87	1.50
		2017	.00	.79	.05	.00	.92	1.50
		2018	-.26	.79	.11	.00	.90	1.50
35	KBLM	2016	-.40	.79	.03	.79	.78	1.49
		2017	1.12	.79	.37	.79	.51	1.49
		2018	-1.54	.79	.03	.79	.53	1.49
36	KRAH	2016	-.68	.00	.00	.79	1.17	1.49
		2017	.02	.00	-.08	.79	1.33	1.49
		2018	.00	.00	-.11	.79	1.46	1.49

37	KICI	2016	-0.36	.79	-.03	.00	.52	1.48
		2017	-.25	.79	.02	.79	.56	1.48
		2018	-.21	.79	.02	.00	.56	1.48
38	KLBF	2016	-.23	.79	.15	.00	.22	1.50
		2017	-.24	.79	.15	.00	.19	1.50
		2018	-.24	.79	.14	.00	.18	1.50
39	LION	2016	-.22	.79	.05	.00	.43	1.49
		2017	-.50	.79	.00	.00	.47	1.49
		2018	-.37	.79	.04	.00	.44	1.49
40	LMPI	2016	-.36	.79	.00	.79	.78	1.49
		2017	-.10	.79	-.04	.79	.88	1.49
		2018	-1.54	.79	-.06	.79	.94	1.49
41	MAIN	2016	-.24	.79	.06	.00	.89	1.49
		2017	-1.54	.79	-1.21	.00	.97	1.49
		2018	-.28	.79	.07	.00	.89	1.49
42	MASA	2016	-.19	.79	-.01	.00	.68	1.49
		2017	.11	.79	-.01	.00	.76	1.49
		2018	.14	.79	-.03	.00	.80	1.49
43	MBTO	2016	-.25	.79	.01	.00	.55	1.49
		2017	-.22	.79	-.04	.00	.73	1.49
		2018	-.26	.79	-.17	.00	.86	1.49

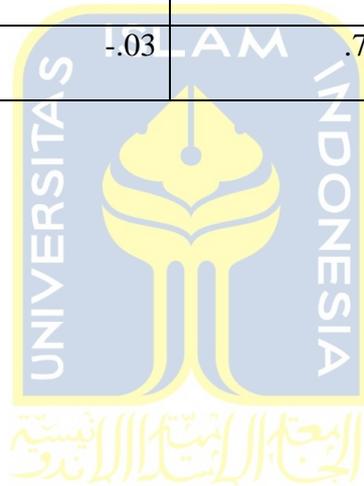
44	MLBI	2016	-0.25	.79	.41	.00	1.06	1.49
		2017	-0.25	.79	.48	.00	.94	1.49
		2018	-0.26	.79	.40	.00	.98	1.49
45	MLIA	2016	-1.11	.79	.06	.00	1.31	1.49
		2017	-0.06	.79	.01	.00	1.10	1.49
		2018	-0.28	.79	.09	.00	.93	1.49
46	MRAT	2016	.34	.79	-.02	.00	.30	1.49
		2017	-.05	.79	.00	.00	.34	1.49
		2018	-1.14	.79	.00	.00	.37	1.49
47	MYOR	2016	-.24	.79	.10	.00	.82	1.49
		2017	-.25	.79	.10	.00	.80	1.50
		2018	-.26	.79	.10	.00	.81	1.50
48	NIKL	2016	.03	.79	.02	.00	1.11	1.49
		2017	-.06	.79	.01	.00	1.11	1.49
		2018	-.12	.79	.01	.00	1.18	1.49
49	PBRX	2016	-.27	.79	.02	.00	.91	1.49
		2017	-.28	.79	.01	.00	.96	1.49
		2018	-.21	.79	.03	.00	.92	1.49
50	PTSN	2016	-.30	.79	.02	.00	.30	1.49
		2017	-.34	.79	.00	.00	.32	1.49
		2018	-.26	.79	.04	.00	1.26	1.49

51	PYFA	2016	-0.26	.79	.03	.00	.53	1.48
		2017	-0.25	.79	.03	.00	.44	1.48
		2018	-0.25	.79	.05	.00	.52	1.48
52	RICY	2016	-0.38	.79	.01	.00	1.13	1.49
		2017	-0.34	.79	.01	.00	1.14	1.49
		2018	-0.36	.79	.01	.00	1.18	1.49
53	ROTI	2016	-0.24	.79	.09	.00	.80	1.49
		2017	-0.27	.79	.03	.00	.55	1.49
		2018	-0.31	.79	.03	.00	.47	1.49
54	SCCO	2016	-0.22	.79	.14	.00	.79	1.49
		2017	1.12	.79	.37	.00	.44	1.49
		2018	-0.25	.79	.06	.00	.41	1.49
55	SIPD	2016	.49	.79	.00	.00	.89	1.49
		2017	.46	.79	-.16	.00	1.07	1.49
		2018	-0.23	.79	.02	.00	1.01	1.49
56	SKBM	2016	-0.26	.79	.02	.79	1.04	1.49
		2017	-1.54	.00	.01	.79	.53	1.49
		2018	-0.23	.79	.01	.79	.61	1.49
57	SKTL	2016	-1.54	.79	.29	.00	.74	1.49
		2017	-0.16	.79	.02	.00	.82	1.49
		2018	-0.19	.79	.05	.00	.88	1.49
58	SMCB	2016	.58	.79	.45	.00	.97	1.50

		2017	.10	.79	-.04	.00	1.05	1.50
		2018	.21	.79	-.04	.00	1.09	1.50
59	SMSM	2016	-.23	.79	.21	.00	.40	1.49
		2017	-.23	.79	.23	.00	.32	1.49
		2018	-.23	.79	.23	.00	.29	1.49
60	SPMA	2016	-.27	.79	.04	.00	.79	1.49
		2017	-.23	.79	.04	.00	.71	1.49
		2018	-.24	.79	.04	.00	.69	1.49
61	SRIL	2016	-.10	.79	.06	.00	1.08	1.49
		2017	-.06	.79	.05	.00	1.04	1.50
		2018	-.15	.79	.06	.00	1.02	1.50
62	SRSN	2016	1.39	.79	.09	.00	.66	1.49
		2017	-.07	.79	.02	.00	.52	1.49
		2018	-.23	.79	.09	.00	.41	1.49
63	SSTM	2016	-.16	.79	-.02	.00	1.05	1.49
		2017	-.23	.79	-.04	.00	1.08	1.49
		2018	-.37	.79	.00	.00	1.02	1.49
64	TBMS	2016	-.25	.79	.06	.00	1.29	1.49
		2017	-.28	.79	.05	.00	1.29	1.49
		2018	-.24	.79	.03	.00	1.29	1.49
65	TFCO	2016	.32	.79	.02	.00	.10	1.49
		2017	-.44	.79	.01	.00	.12	1.49

		2018	-0.44	0.00	0.45	0.00	0.09	1.49
66	TIRT	2016	-0.22	0.79	0.04	0.00	1.39	1.49
		2017	-0.52	0.79	0.01	0.00	1.40	1.49
		2018	-0.04	0.79	-0.04	0.00	1.47	1.49
67	TOTO	2016	-0.32	0.79	0.06	0.00	0.61	1.48
		2017	-0.26	0.79	0.09	0.00	0.59	1.49
		2018	-0.23	0.79	0.14	0.00	0.47	1.49
68	TRIS	2016	-0.44	0.79	0.03	0.00	0.70	1.49
		2017	-0.34	0.79	0.04	0.00	0.49	1.49
		2018	-0.19	0.79	0.03	0.00	0.66	1.49
69	TRST	2016	0.43	0.79	0.00	0.79	0.61	1.49
		2017	1.12	0.79	0.02	0.79	0.60	1.49
		2018	0.64	0.79	0.04	0.79	0.74	1.49
70	ULTJ	2016	-0.23	0.79	0.16	0.00	0.21	1.49
		2017	-0.30	0.79	0.14	0.00	0.23	1.49
		2018	-0.26	0.79	0.13	0.00	0.16	1.49
71	UNIC	2016	0.71	0.79	0.09	0.00	0.39	1.49
		2017	-0.31	0.79	0.05	0.00	0.39	1.49
		2018	-0.37	0.79	0.07	0.00	0.40	1.49
72	UNVR	2016	-0.25	0.79	0.34	0.79	1.20	1.50
		2017	-0.25	0.79	0.36	0.79	1.21	1.50
		2018	-0.25	0.79	0.45	0.79	1.01	1.50

73	VOKS	2016	-0.28	.79	.10	.79	.98	1.49
		2017	-0.27	.79	.08	.79	1.01	1.49
		2018	-0.25	.79	.04	.79	1.04	1.49
74	WIIM	2016	-0.22	.79	.07	.79	.35	1.49
		2017	-0.25	.79	.02	.79	.25	1.49
		2018	-0.27	.79	.02	.79	.24	1.49
75	YPAS	2016	-0.02	.79	-0.03	.79	.77	1.48
		2017	-0.03	.79	-0.05	.79	.95	1.48
		2018	-0.03	.79	-0.03	.79	1.06	1.48



LAMPIRAN IV

Hasil Output SPSS

1. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minim um	Maxim um	Mean	Std.Deviati on
Kepemilikan Keluarga	.00	1.00	.9867	.11495
Return On Asset	-2.65	.53	.0436	.20926
Koneksi Politik	.00	1.00	.1467	.35456
Leverage	-1.59	11.10	1.3131	1.54155
Ukuran Perusahaan	.00	14.10	12.387 3	1.06515
Tax Avoidance	-32.19	5.55	-.3397	2.23480
Valid N (listwise)				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandard ized Residual
n		225
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0088781
	Std.Deviati on	.43253526
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		1.312
Asymp.Sig.(2-tailed)		.064

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

3. Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Kepemilikan Keluarga	.941	1.063	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Return On Asset	.993	1.007	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Koneksi Politik	.937	1.067	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Leverage	.991	1.009	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Ukuran Perusahaan	.994	1.006	Tidak Terjadi Multikolinearitas

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

4. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Kepemilikan Keluarga	.330	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Return On Asset	.194	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Koneksi Politik	.107	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Leverage	.634	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Ukuran Perusahaan	.668	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: ABS_RES

5. Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	-.615	.422		-1.457	.146
	Kepemilikan Keluarga	.638	.207	.206	3.078	.002
	Return On Asset	.414	.141	.192	2.944	.004
	Koneksi Politik	.136	.093	.098	1.454	.147
	Leverage	-.005	.065	-.005	-.075	.940
	Ukuran Perusahaan	-.069	.257	-.017	-.268	.789

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

